

**KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI
AFRIKA SELATAN PADA TAHUN 2016-2018
SKRIPSI**



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

AYU WIDIA NINGRUM

20323230

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

**KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI
AFRIKA SELATAN PADA TAHUN 2016-2018**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

AYU WIDIA NINGRUM

20323230

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan di Afrika Selatan
Pada Tahun 2016-2018**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Program Studi Hubungan
Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam
memperoleh derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial
Budaya Universitas Islam Indonesia



Karima Dami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Gustrieni Putri, S.I.P., M.A.
- 2 Hadza Min Fadhil Robby S.I.P., M.Sc
- 3 Masitoh Nur Rohma S.Hub.Int., M.A

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 13 Maret 2024



Ayu Widia Ningrum

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
ABSTRAK	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Cakupan penelitian	8
1.5 Tinjauan Pustaka	9
1.6 Kerangka Pemikiran.....	12
1.7 Argumen Sementara	15
1.8 Metode Penelitian.....	16
1.8.1 Jenis Penelitian	16
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	16
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	16
1.8.4 Proses Penelitian.....	16
1.9 Sistematika Pembahasan	17
BAB 2 ANALISIS KEKERASAN STRUKTURAL DAN LANGSUNG BERDASARKAN SEGITIGA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI AFRIKA SELATAN.....	18
2.1. Kesenjangan Yang Terjadi Terhadap Perempuan Afrika Selatan	19
2.1.1 Aspek Agama Sebagai Penyebab Kekerasan Kultural.....	22
2.1.2 Aspek Kosmologi Sebagai Penyebab Kekerasan Kultural.....	26
2.1.3 Aspek Ilmu Empiris Sebagai Penyebab Kekerasan Kultural.....	29
BAB 3 ANALISIS KEKERASAN STRUKTURAL DAN LANGSUNG BERDASARKAN SEGITIGA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI AFRIKA SELATAN.....	32
3.1. Bentuk Kekerasan Struktural Terhadap Perempuan di Afrika Selatan Pada Tahun 2016-2018	32
3.1.1 Kekerasan Struktural yang Merugikan Kebutuhan Akan Kehidupan dan Kesejahteraan	34
3.1.2. Kekerasan Struktural yang Melukai Atas Kebutuhan Identitas.....	37
3.1.3 Kekerasan Struktural yang Melukai Kebutuhan Atas Kemerdekaan ..	40

3.2. Kekerasan Langsung Terhadap Perempuan Afrika Selatan Pada Tahun 2016-2018	42
3.2.1 <i>Kekerasan Langsung Yang Mengancam Keberlangsungan Hidup</i>	43
BAB 4 PENUTUP	46
2.1. Kesimpulan	46
2.2 Rekomendasi	51
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Yang terpilih dan Yang tidak terpilih dalam Agama	22
Tabel 2. Kejahatan Pada perempuan di Afrika Selatan.....	30
Tabel 3. Tipologi Kekerasan Menurut Galtung.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Segitiga Kekerasan Galtung.....	12
---	----

ABSTRAK

Kekerasan terhadap perempuan seringkali terjadi di Afrika Selatan dan menjadi masalah yang belum terselesaikan. Situasi ini semakin memburuk dengan meningkatnya angka kekerasan pada tahun 2016-2018, yang diakibatkan oleh kurangnya penegakan hukum dan kebijakan pemerintah. Keadaan ini membuat perempuan lebih rentan terhadap kekerasan, baik secara bentuk verbal maupun non-verbal. Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan di Afrika Selatan, akan ditinjau menggunakan Konsep Segitiga Kekerasan oleh Johan Galtung. Dapat dikatakan bahwasannya kekerasan terhadap perempuan di Afrika Selatan berawal dari kekerasan kultural yang meliputi agama, kosmologi, dan ilmu empiris. Yang kemudian berlanjut menjadi kekerasan struktural sehingga membuat terjadinya pola-pola kekerasan terhadap perempuan kekerasan yang melekat dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi di suatu masyarakat Galtung membedakan antara kekerasan langsung (*direct violence*) dan kekerasan struktural (*structural violence*). Kekerasan langsung adalah tindakan fisik yang dapat secara langsung merugikan atau melukai individu atau kelompok. Contohnya termasuk serangan fisik, pembunuhan, atau penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat keamanan. Kekerasan langsung lebih mudah dikenali karena dampaknya langsung terlihat. Sedangkan kekerasan struktural terdapat adanya ketidakadilan seperti ketidaksetaraan ekonomi, politik, atau sosial yang menguntungkan satu kelompok dan merugikan kelompok lain.

Kata-kata kunci: *Kekerasan, perempuan, Afrika Selatan, Galtung, Segitiga kekerasan*

ABSTRACT

Violence against women occurs frequently in South Africa and is an unresolved problem. This situation worsened with increasing levels of violence in 2016-2018, which was caused by a lack of law enforcement and government policies. This situation makes women more vulnerable to violence, both verbal and non-verbal. In cases of violence against women in South Africa, it will be reviewed using the Violence Triangle Concept by Johan Galtung. It can be said that violence against women in South Africa originates from cultural violence which includes religion, cosmology and empirical science. Which then continues to become structural violence, thus creating patterns of violence against women, violence that is embedded in the social, political and economic structure of a society. Galtung distinguishes between direct violence and structural violence. Direct violence is a physical act that can directly harm or injure an individual or group. Examples include physical attacks, murder, or abuse of power by security forces. Direct violence is easier to recognize because its impact is immediately visible. Meanwhile, structural violence involves injustice such as economic, political or social inequality that benefits one group and harms other groups.

Keywords: *Violence, women, South Africa, Galtung, Triangle of violence.*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesetaraan gender merupakan suatu ungkapan yang sering dilontarkan oleh para feminis, dan juga seringkali ditafsirkan sebagai ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Dalam **praktiknya**, konsep ini menyoroti ketidaksetaraan yang berdampak pada perempuan, termasuk kekerasan, penindasan, pelecehan, dan sejenisnya. Isu kesetaraan gender sering mendapat dukungan luas dari masyarakat karena dianggap sebagai bagian dari perjuangan untuk keadilan sosial yang lebih besar (Enaifoghe 2019,15).

Meski demikian, kesetaraan gender mengindikasikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama sebagai individu manusia. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender tidak adanya diskriminasi antara kedua jenis kelamin. Kesetaraan gender mencakup penghapusan standar peran yang kaku, pengurangan beban ganda, mengakhiri marginalisasi, serta tidak adanya lagi kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki. Menurut UN Women terdapat tujuh jenis kekerasan pada perempuan seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan dalam berumah tangga, kekerasan online atau digital, feminisda, perdagangan manusia, dan pernikahan anak. Namun, yang sesuai dengan kondisi di Afrika Selatan hanya ada tiga jenis kekerasan yang terlihat yakni kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan terhadap perempuan terjadi di semua lapisan masyarakat di Afrika Selatan, karena demografi di Afrika Selatan yang mencakup sejumlah karakteristik penting yang mencerminkan keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, dan tingkat perkembangan ekonomi di negara tersebut. Namun, perempuan berkulit hitam lebih rentan terhadap kekerasan karena faktor sosial, ekonomi, dan sejarah yang kompleks di negara tersebut yang menyebabkan perempuan berkulit hitam sering kali berada di posisi yang lebih rendah dalam hierarki sosial dan ekonomi hal ini berujung menjadi ketidaksetaraan dalam berbagai akses seperti pendidikan, pekerjaan yang layak, dan juga sumber daya ekonomi dapat meningkatkan kerentanan mereka terhadap kekerasan dengan adanya faktor tersebut dapat menciptakan kondisi di mana perempuan berkulit hitam di Afrika Selatan sering kali rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik itu kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, eksploitasi seksual, atau kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain di dalam masyarakat. Disamping itu Afrika Selatan merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, di mana berbagai etnis, tradisi, dan kepercayaan saling bersilangan dan memperkaya satu sama lain. Salah satu contoh yang mencolok adalah keberadaan suku Zulu, suku Zulu adalah salah satu suku tradisional yang paling terkenal di Afrika Selatan dan berasal dari daerah KwaZulu Natal (Cultures of South Africa n.d.).

Yang mana suku ini terdapat sebuah praktik budaya lobola yang mana budaya lobola ini Budaya lobolo ini mengarah pada valorisasi perempuan karena menganggap perempuan adalah milik suaminya. Selain itu, dalam budaya Lobola, perempuan tidak diperbolehkan meninggalkan perkawinan setelah dibeli, jika perempuan yang dibeli ingin meninggalkan perkawinan, ia harus membayarnya kembali. Budaya lobola yang bertahan tidak dapat mengubah kekerasan perempuan

di Afrika Selatan dan menyebabkan banyak penderitaan. Jika hal ini berkaitan dengan bahasa tuhan, yang berarti jika perempuan milik laki-laki mereka harus patuh dan tunduk. Perempuan akan menghadapi sanksi kekerasan yang lebih parah daripada yang sebelumnya jika mereka menolak (Africa 2019).

UN Women juga mengatakan bahwa sejumlah perempuan yang berkulit hitam di Afrika Selatan, baik di dalam maupun di luar rumah, merasa terancam oleh potensi kekerasan yang bisa terjadi tanpa memandang tempat dan waktu. Perempuan di berbagai penjuru dunia mengalami berbagai bentuk, latar belakang, frekuensi, dan tingkat keparahan kekerasan, baik dari pasangan mereka maupun anggota keluarga. Kehadiran kekerasan terhadap perempuan di Afrika Selatan berdampak pada kesehatan mental perempuan di negara itu dan juga menciptakan rasa ketidakamanan bagi individu yang menjadi korban kekerasan tersebut di lingkungan mereka (UN Women n.d.).

Kekerasan pada perempuan memiliki arti umum, seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual yang dapat menyebabkan tekanan atau penderitaan pada perempuan. Setiap perbuatan yang dapat menyebabkan tekanan penderitaan seperti fisik, seksual, atau psikologis pada perempuan, termasuk ancaman akan tindakan spesifik, paksaan terhadap perempuan, atau pengurangan kebebasan secara sewenang-wenang. Kekerasan berbasis gender pada perempuan merupakan jenis dan kontinum dari kekerasan berbasis gender. Bahkan fenomena kekerasan terhadap perempuan masih berlangsung di berbagai negara, termasuk kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Afrika Selatan (Mitchell, Lange, and Moletsane 2018).

Afrika Selatan merupakan salah satu negara dengan tingkat kekerasan tertinggi di dunia, terutama dalam konteks di mana negara ini dikenal sebagai "ibu kota pemerkosaan". Di samping itu juga karena sistem hukum di Afrika Selatan

belum terbukti cukup efektif dalam mencegah peningkatan kekerasan terhadap perempuan dibandingkan negara lain. Berdasarkan data yang diperoleh dari SAPS (South African Police Service), jumlah kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan berkulit hitam mengalami fluktuasi selama periode 2015-2018. Pada tahun 2015-2016, tercatat kasus kekerasan, kemudian mengalami penurunan menjadi 173.405 kasus pada tahun 2016-2017, namun kemudian mengalami peningkatan kembali menjadi 177.620 kasus pada tahun 2017-2018. Meskipun terdapat penurunan sementara, namun pada akhirnya jumlah kasus kembali meningkat, dan hal ini sulit mengalami penurunan karena kurangnya kebijakan dari sistem hukum di Afrika Selatan (Services African Police Service n.d.)

Berdasarkan pernyataan dari VOA Indonesia bahwa Afrika Selatan memiliki reputasi yang sangat buruk dengan tingkat kekerasan tinggi di dunia terhadap perempuan berkulit hitam. Sebanyak 100 kasus pemerkosaan dilaporkan setiap harinya. Namun, tingkat penuntutan masih sangat rendah untuk kasus kekerasan terhadap perempuan karena salah satu tantangan utamanya adalah jumlah besar kasus pelecehan yang tidak dilaporkan kepada otoritas. Dalam beberapa situasi, korban enggan melaporkan pelecehan karena merasa bahwa petugas polisi kurang terlatih dalam menangani kekerasan gender dan mungkin mengabaikan atau tidak peka terhadap kekhawatiran mereka, terutama ketika perempuan berkulit hitam melaporkan kasus tersebut (VOA 2022).

Banyak terjadinya kasus pemerkosaan di Afrika Selatan yang mana kasus tersebut mengalami peningkatan bahkan ada ratusan kasus pemerkosaan di setiap harinya kasus ini juga pernah menjadi pandemi yang harus dihadapi Afrika Selatan setiap tahunnya, salah satu contohnya kasus yang terjadi di Kota Rustenburg pada tahun 2016. Yang mana sekitar setengah dari jumlah perempuan yang berkulit

hitam di kota Rustenburg Afrika Selatan menjadi korban kekerasan seksual tercatat sekitar 11.000 perempuan yang menjadi korban pemerkosaan lalu pada tahun 2017 tercatat 39.828 kasus pemerkosaan dan pada tahun 2018 tercatat sekitar 40.035 kasus pemerkosaan dengan rata-rata 110 kasus setiap harinya data ini berdasarkan laporan organisasi pengecekan fakta Afrika. Pada kasus tersebut para pelaku dan korban kasus kekerasan seksual yakni masyarakat sipil di Kota Rustenburg Afrika Selatan itu sendiri (GlobalCitizen n.d. 2020).

Dari kasus-kasus tersebut baik dari seluruh Afrika Selatan maupun dari salah satu kota bagian Afrika Selatan yaitu Rustenburg, adanya beberapa upaya untuk menangani kasus pemerkosaan tersebut seperti adanya kampanye dari para aktivisme, kebijakan pemerintah dan hukum untuk para pelaku kekerasan seksual. Seperti pada tahun 2016 kampus-kampus di seluruh Afrika Selatan dan para aktivisme membuat kampanye tentang #EndRapeCulture disini para perempuan-perempuan muda dimobilisasi untuk melawan kekerasan berbasis gender di Afrika Selatan. Di awal kampanye, salah satu penyelenggara yang paling banyak adalah seorang wanita kulit hitam Afrika yang turun ke jalan untuk memprotes, sering bertelanjang dada atau dengan pakaian dalam, untuk mengatakan "Cukup - kami lelah dengan kekerasan ini!". Yang luar biasa, mereka menyatakan bahwa mereka menganut perspektif feminis, yang kurang umum bagi generasi perempuan yang lebih tua yang curiga terhadap jenis feminisme yang menyarankan identitas esensial yang mengaburkan pengalaman perempuan kulit putih sebagai norma bahkan ketika mereka mendukung gagasan feminis tentang kesetaraan. Mereka tidak takut membicarakan daftar feminis, perspektif titik-temu, dari sudut pandang feminisme (Gouws 2020).

Hal tersebut membuat mereka termotivasi feminisme oleh tempat identitas

kulit hitam Afrika dalam masyarakat pasca kolonial/pasca apartheid, dan berakarnya feminisme dalam filosofi kesadaran kulit hitam dan rasa sakit kulit hitam. Terlepas dari rasisme yang menindas mereka, mereka melihat patriarki sebagai salah satu hambatan utama untuk mengakhiri budaya kekerasan (sikap, persepsi dan stereotip yang menormalkan kekerasan terus terjadi) di masyarakat pada umumnya. Tujuan dari kampanye ini untuk mengakhiri kekerasan di Afrika Selatan yang melalui kampanye, untuk menunjukkan betapa pentingnya ruang digital sebagai upaya melawan kekerasan dengan menggunakan ruang digital dan untuk menentang kekerasan antara feminisme dan digital agar protes ini berwujud fisik tindakan dan menunjukkan pemahaman feminis. Selain itu, terdapat kasus pemerkosaan yang menimpa di beberapa siswa, disini para siswa perempuan mengungkapkan kemarahan mereka dan ketidakberdayaan mereka dalam menghadapi kekerasan berbasis gender melalui kampanye #EndRapeCulture yang melibatkan pawai topless, oleh karena itu pawai tersebut dilakukan sebagai upaya seksstresmisme atau juga sebagai ekspresi atas kemarahan dan kebencian karena tidak didengar. Berdasarkan apa yang mereka rasakan karena adanya kasus kekerasan seksual tetapi protes ini juga sebagai ungkapan rasa sakit yang dialami agar dapat dipahami (Gouws 2020).

Dengan demikian, para aktivis telah menuntut pemerintah Afrika Selatan untuk melakukan revisi kebijakan terkait kekerasan. Akhirnya pemerintah Afrika Selatan mengambil tindakan melalui kebijakan seperti memperketat Undang-Undang yang berbasis kekerasan Upaya ini bertujuan untuk mengatasi kesempatan yang sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengelak dari hukuman penjara. Di samping itu, pemerintah Afrika Selatan sedang merancang undang-undang perubahan dalam sistem pidana yang akan memberlakukan ketentuan yang lebih

ketat, termasuk dalam hal memberikan jaminan kekerasan berbasis gender dan feminis. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memperluas kategori pelanggaran yang harus dikenai hukuman minimal. Selain itu, pemerintah Afrika Selatan juga mengambil kebijakan untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari pelecehan anggota keluarga dalam kasus-kasus kekerasan. Pemerintah juga menegaskan bahwa amandemen tersebut mewajibkan petugas penegak hukum dan pengadilan. Namun, dengan sistem hukum dan tindakan dari pemerintah yang dianggap kurang efektif dalam menangani kasus kekerasan yang mana oleh kenyataan bahwa pelaku kekerasan sering kali hanya dikenai hukuman ringan, seperti penjara dengan durasi yang pendek, alih-alih hukuman yang lebih berat seperti hukuman mati yang mungkin lebih sesuai dalam kasus kekerasan tersebut atau yang berujung pada kasus kejahatan dan pembunuhan.

Kekerasan terhadap perempuan di Afrika Selatan sulit mengalami penurunan. Selain itu salah satu penyebab dari sulitturnya peningkatan kasus dari kekerasan terhadap perempuan di Afrika Selatan karena masih melekatnya budaya patriarki. Budaya patriarki yang dimaksud yaitu budaya patriarki yang diperkuat oleh sistem apartheid yang mengekang peran perempuan dalam masyarakat, dengan membatasi akses mereka terhadap pendidikan dan peluang pekerjaan. Oleh karena itu, meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan di Afrika Selatan menimbulkan kekecewaan di kalangan perempuan karena hukuman yang diberikan kepada pelaku dianggap tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan (Republika, 2020). Pemerintah hanya memberikan janji-janji tentang bantuan dan dana bagi korban kekerasan, namun tidak semua korban menerima hak-hak yang seharusnya mereka peroleh.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana kekerasan terhadap perempuan di Afrika Selatan pada tahun 2016-2018.

1.1 Rumusan Masalah

Bagaimana kekerasan terhadap perempuan di Afrika Selatan pada tahun 2016-2018 ?

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menjelaskan bagaimana kekerasan terhadap perempuan berkulit hitam di Afrika Selatan pada tahun 2016-2018 di tinjau dari konsep segitiga kekerasan Galtung.

1.3 Cakupan penelitian

Penelitian ini akan membahas tentang konsep segitiga kekerasan yang terjadi di Afrika Selatan pada tahun 2016 hingga 2018. Perempuan berkulit hitam Afrika Selatan dipilih karena penulis melihat kekerasan terhadap perempuan berkulit hitam di Afrika Selatan sudah berlangsung sebelum tahun 2016-2018 bahkan kasus kekerasan tersebut masih terjadi sampai sekarang. Bahkan terus mengalami fluktuasi peningkatan. Walaupun pemerintah Afrika Selatan telah membuat kebijakan.

Kemudian pada penelitian ini mempunyai batasan waktu yaitu pada tahun 2016-2018 yang mana pada tahun tersebut data yang didapatkan terdapat banyak kasus kekerasans seksual terhadap perempuan berkulit hitam yang mana pada tahun 2015-2016, tercatat 186.745 kasus kekerasan, kemudian mengalami penurunan menjadi 173.405 kasus pada tahun 2016-2017, namun kemudian mengalami peningkatan kembali menjadi 177.620 kasus pada tahun 2017-2018. Meskipun terdapat penurunan sementara, namun pada akhirnya jumlah kasus kembali meningkat, dan hal ini sulit mengalami penurunan karena kurangnya

kebijakan dari sistem hukum di Afrika Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini akan memudahkan penulis untuk mengumpulkan data terkait kasus kekerasan terhadap perempuan berkulit hitam di Afrika Selatan, dengan tujuan untuk memahami fenomena ini secara lebih mendalam.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai penelitian ini menggarisbawahi tentang kekerasan terhadap perempuan di Afrika Selatan. Dengan demikian, penulis mencoba melakukan beberapa tinjauan yang membahas kekerasan di Afrika Selatan. Dalam penelitian, penulis menggunakan Buku *Addressing Sexual Violence in South Africa: Gender Activism in the Making* yang ditulis oleh Claudia Mitchell, Lange, and Moletsane. Buku ini membahas tentang upaya dalam mengatasi kekerasan seksual di Afrika Selatan dan peran aktivisme gender dalam proses tersebut. Afrika Selatan dikenal dengan tingginya tingkat kekerasan seksual yang terjadi di negara tersebut. Dalam jurnal ini, penulis menjelaskan tentang bagaimana aktivis gender bekerja untuk mengatasi masalah ini. Buku ini menyoroti peran organisasi masyarakat sipil, kelompok advokasi, dan individu dalam membangun kesadaran, menyediakan dukungan kepada para korban, dan menuntut pertanggungjawaban dari pelaku kekerasan. Selain itu, buku ini juga membahas tantangan yang dihadapi oleh aktivisme gender dalam proses ini (Mitchell, Lange, and Moletsane 2018).

Jurnal kedua yang penulis gunakan sebagai kajian pustaka adalah buku milik Amanda Gouws yang berjudul *EndRapeCulture Campaign in South Africa: Resisting Sexual Violence Through Protest and the Politics of Experience* buku ini membahas kampanye "EndRapeCulture" di Afrika Selatan yang bertujuan untuk melawan kekerasan pada perempuan melalui protes dan politik pengalaman. Kampanye ini merupakan bentuk perlawanan terhadap budaya pemerkosaan yang ada di masyarakat. Dalam buku ini, penulis menjelaskan bagaimana protes dan aksi kolektif menjadi strategi penting dalam menghadapi kekerasan seksual. Kampanye "EndRapeCulture"

mengorganisir demonstrasi, pertemuan, dan acara lainnya untuk memperjuangkan perubahan dan mengadvokasi hak-hak korban kekerasan seksual. Penulis buku ini juga menyoroti pentingnya politik pengalaman dalam konteks kampanye ini. Namun, penulis juga menyoroti keberhasilan dan dampak positif yang dicapai oleh kampanye tersebut, seperti peningkatan kesadaran masyarakat, perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap kekerasan seksual, dan peningkatan akses ke layanan dukungan bagi para korban (Gouws 2020).

Selanjutnya dalam kajian pustaka yang ketiga, penulis menggunakan jurnal berjudul *Gender Violence and the Global Gendered Viewpoint Approaches to Building a Peaceful South Africa* yang ditulis oleh Andrew Osehi Enaifoghe. Jurnal ini membahas tentang kekerasan gender dan pendekatan pandangan gender global dalam membangun Afrika Selatan yang damai. Jurnal ini menyoroti hubungan antara kekerasan gender dan ketidakadilan gender, serta implikasinya terhadap perdamaian dan stabilitas di Afrika Selatan. Jurnal ini membahas tentang kekerasan gender dan pendekatan pandangan gender global dalam membangun Afrika Selatan yang damai. Jurnal ini menyoroti hubungan antara kekerasan gender dan ketidakadilan gender, serta implikasinya terhadap perdamaian dan stabilitas di Afrika Selatan (Enaifoghe 2019).

Selanjutnya penulis akan meninjau penelitian yang ditulis oleh Sheena Swemmer dalam jurnalnya yang berjudul *Justice Denied: Examining the Legal Response to Sexual Violence in South Africa*. Dalam jurnal ini, penulis mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi undang-undang terkait kekerasan seksual, seperti rendahnya angka penuntutan dan hukuman yang proporsional terhadap pelaku kekerasan seksual. Mereka juga mungkin membahas tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum dalam memperoleh bukti yang cukup, mendukung korban selama proses hukum, dan memberikan keadilan yang

memadai. Jurnal ini juga menyoroti perlunya perubahan dalam pendekatan hukum terhadap kekerasan seksual, seperti penggunaan perspektif yang berfokus pada korban dan mendukung pemulihan mereka. Mereka mungkin memberikan rekomendasi tentang perbaikan kebijakan, peningkatan dukungan bagi korban, pelatihan bagi petugas hukum, dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk meningkatkan respons hukum terhadap kekerasan seksual di Afrika Selatan (Swemmer 2020).

Dari jurnal-jurnal dan buku yang telah dijabarkan, seluruhnya telah membahas kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Afrika Selatan. Beberapa diantaranya juga sudah menjelaskan mengenai upaya dalam mengatasi kekerasan di Afrika Selatan seperti, kampanye "EndRape Culture" di Afrika Selatan yang bertujuan untuk melawan kekerasan seksual melalui protes dan aksi kolektif menjadi strategi penting dalam menghadapi kekerasan, dan sistem hukum untuk memperoleh bukti yang cukup, mendukung korban selama proses hukum, dan memberikan keadilan yang memadai. Meski demikian belum ada jurnal yang membahas secara rinci mengenai penyebab sulitnya penurunan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Afrika Selatan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, konsep segitiga kekerasan yang diperkenalkan oleh Johan Galtung digunakan untuk membahas kekerasan terhadap perempuan di Afrika Selatan pada tahun 2016-2018. Menurut Galtung konsep ini terdiri dari tiga bentuk kekerasan, yaitu kekerasan kultural, struktural, dan langsung (Galtung 1990). Setiap bentuk kekerasan memiliki definisi yang berbeda. Kekerasan kultural adalah upaya untuk membenarkan dalam suatu lingkungan sosial, yang dapat memperkuat kekerasan struktural dan langsung. Kekerasan struktural, di sisi lain, merupakan bentuk kekerasan yang sulit ditentukan pelakunya dan cenderung melukai kebutuhan individu. Sementara itu, kekerasan langsung adalah tindakan kekerasan yang dapat diidentifikasi pelakunya dan dimiliki oleh korban (Galtung 1990, 291).

Gambar 1. Segitiga Kekerasan Galtung



Sumber : Cultural Violence (Galtung, 1990).

Gambar diatas menjelaskan adanya tiga bagian kekerasan. Yaitu bagian pertama kekerasan langsung, yang dimana kekerasan ini berbentuk fisik atau verbal yang secara langsung merugikan individu contoh termasuk kekerasan fisik, atau pelecehan verbal. Bagian kedua atau berikutnya adalah kekerasan kultural, yang

merupakan jenis kekerasan yang tidak terlihat. Kekerasan kultural terdiri dari tujuh aspek, seperti agama, ideologi, seni, bahasa, kosmologi, ilmu formal, dan ilmu empiris (Galtung 1990, 291). Namun, dari tujuh aspek tersebut penulis hanya menggunakan tiga aspek saja yakni, agama, kosmologi dan ilmu empiris. Selanjutnya, bagian terakhir yaitu kekerasan struktural. Kekerasan struktural menurut Galtung atau *Structural Violence*, adalah kekerasan yang merujuk pada pola-pola kekerasan yang melekat dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi di suatu masyarakat Galtung membedakan antara kekerasan langsung (*direct violence*) dan kekerasan struktural (*structural violence*) (Galtung 1990). Kekerasan langsung adalah tindakan fisik yang dapat secara langsung merugikan atau melukai individu atau kelompok. Contohnya termasuk serangan fisik, pembunuhan, atau penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat keamanan. Kekerasan langsung lebih mudah dikenali karena dampaknya langsung terlihat. Sedangkan kekerasan struktural terdapat adanya ketidakadilan seperti ketidaksetaraan ekonomi, politik, atau sosial yang menguntungkan satu kelompok dan merugikan kelompok lain. Kekerasan struktural ini terjadi melalui pengaturan institusional, norma sosial, dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya.

Pengaturan institusional mengacu pada aturan, regulasi, struktur, dan prosedur yang ada dalam suatu masyarakat atau organisasi untuk mengatur interaksi antara individu, kelompok, dan entitas lainnya yang mencakup hukum, kebijakan, lembaga, dan mekanisme yang mempengaruhi cara sumber daya dikelola, didistribusikan, dan diakses. Pada norma sosial aturan-aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku anggota masyarakat. Norma ini berkembang sebagai panduan tentang bagaimana seharusnya berperilaku, berinteraksi, dan berkomunikasi dalam

lingkungan sosial tertentu. Norma sosial mempengaruhi bagaimana sumber daya dilihat, dibagi, dan dimanfaatkan oleh individu dan kelompok dan Ketidakadilan sumber daya terjadi ketika distribusi, akses, atau pengelolaan sumber daya tidak merata atau tidak adil dalam masyarakat. Hal ini dapat berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, atau politik, di mana sebagian individu atau kelompok memiliki lebih banyak keuntungan atau kontrol terhadap sumber daya daripada yang lain. Semua konsep ini saling terkait dan dapat berinteraksi dalam pengelolaan sumber daya, yang mana mereka memengaruhi bagaimana sumber daya tersebut diperlakukan dan dimanfaatkan dalam masyarakat. Selain itu Galtung mengemukakan bahwa kekerasan struktural memiliki dampak jangka panjang yang lebih merusak daripada kekerasan fisik yang terjadi secara langsung. Hal ini karena kekerasan struktural mengakibatkan ketidakadilan dan menyebabkan ketegangan sosial yang terus-menerus. Galtung juga mengidentifikasi beberapa contoh kekerasan struktural, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, diskriminasi rasial, imperialisme, dan penindasan politik. Ia berpendapat bahwa untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan, perlu ada perubahan struktural yang mengatasi ketidakadilan ini (Galtung 1969).

Pada penelitian ini untuk melihat bagaimana kekerasan terhadap perempuan berkulit hitam di Afrika Selatan penulis menggunakan ketiga konsep dalam kekerasan dari teori Galtung. Dalam tulisan Galtung, penulis ingin menjelaskan dan mengimplementasikan dari tiga bentuk kekerasan tersebut seperti beberapa aspek dari kekerasan kultural, yakni aspek agama, aspek kosmologi, dan aspek empiris. Sedangkan untuk menjelaskan kekerasan struktural yang terjadi di Afrika Selatan, penulis menggunakan empat unsur dari kekerasan tersebut ialah penetrasi,

marginalisasi, segmentasi, dan fragmentasi. Tidak hanya itu, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan dua komponen dari kekerasan langsung yang telah digagas oleh Johan Galtung yaitu, kekerasan yang melukai atas hidup dan kekerasan yang melukai atas kemerdekaan (Galtung, Cultural Violence 1990).

1.7 Argumen Sementara

Untuk menganalisis kekerasan terhadap perempuan berkulit hitam di Afrika Selatan penulis menggunakan tiga bentuk kekerasan yakni kekerasan langsung, kekerasan kultural dan struktural. Yang mana kekerasan tersebut disebabkan dengan adanya budaya patriarki yang mencakup tiga aspek seperti, agama, kosmologi, dan ilmu empiris disebabkan oleh kekerasan kultural. Dan hubungan kekerasan langsung yang terjadi karena budaya patriarki seperti adanya kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki yang pada akhirnya menyebabkan kekerasan fisik pada perempuan.

Pada kekerasan struktural terjadi adanya ketidakadilan dalam sumber daya. Pengaturan institusional merujuk pada struktur kelembagaan yang ada dalam masyarakat dan bagaimana mereka mempengaruhi distribusi kekuasaan, sumber daya, dan keadilan di Afrika Selatan, contoh pengaturan institusional yang menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan struktural. Norma sosial yang membenarkan kekerasan dapat menjadi faktor yang mempertahankan pola kekerasan di Afrika Selatan, Norma-norma yang memperbolehkan atau membenarkan kekerasan terhadap perempuan berkulit hitam di Afrika Selatan berujung dapat mengancam kebutuhan dasar mereka akan hidup, identitas, dan kemerdekaan. Norma-norma semacam itu dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan merusak bagi perempuan berkulit hitam, yang berdampak pada hak

mereka untuk hidup tanpa takut, mempertahankan identitas mereka, dan meraih kemerdekaan penuh dalam berbagai aspek kehidupan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Kualitatif adalah salah satu metode yang tepat dalam penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penulis tidak menggunakan prosedur angka dalam mengumpulkan data. Penelitian yang bersifat deskriptif menggunakan analisis yang diangkat dalam penelitian (Sugiarto 2015).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini yaitu perempuan berkulit hitam di Afrika Selatan yang sering kali menjadi korban kekerasan pada tahun 2016-2018. Sedangkan objek penelitian ini akan menganalisis konsep segitiga kekerasan Galtung terhadap kekerasan perempuan di Afrika Selatan selama periode tersebut.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, dilakukan pengumpulan data menggunakan pendekatan riset yang terkait dengan tema kekerasan dan kasus yang terkait. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui data sekunder, yang diperoleh dari sumber resmi seperti situs web, buku, artikel, dan jurnal.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses pengumpulan data ini, penulis melakukan penelitian melalui buku, jurnal, artikel, dan situs web yang valid. Data yang diperoleh tersebut sesuai

dengan tema penelitian yang sedang teliti. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis dan menggunakan teori yang diperoleh penulis.

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab 1-PENDAHULUAN penulis menjelaskan latar belakang, dari isu penelitian yang diangkat yaitu kekerasan pada perempuan di Afrika Selatan, pada bab ini juga akan membahas rumusan masalah, cakupan penelitian, tujuan penelitian, kerangka pemikiran/landasan teori, kajian pustaka, hingga metodologi penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab 2-KEKERASAN KULTURAL PADA PEREMPUAN DI AFRIKA SELATAN penulis akan membahas kekerasan kultural di Afrika Selatan dalam beberapa aspek, namun pada bab ini penulis hanya mengambil tiga aspek yaitu, Aspek agama sebagai penyebab terjadinya kekerasan, aspek kosmologi sebagai penyebab kekerasan dan aspek ilmu empiris sebagai penyebab kekerasan.

Bab 3-KEKERASAN LANGSUNG BERDASARKAN SEGITIGA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI AFRIKA SELATAN penulis akan menjelaskan implementasi konsep kekerasan struktural dan langsung berdasarkan konsep segitiga kekerasan Galtung.

Bab 4-KESIMPULAN, SARAN, DAN REKOMENDASI

BAB 2

KEKERASAN KULTURAL TERHADAP PEREMPUAN DI AFRIKA SELATAN

Untuk mengaitkan kekerasan atas nama perempuan berkulit hitam di Afrika Selatan mulai tahun 2016-2018, pada bab ini penulis akan membahas kesenjangan dan kekerasan kultural berdasarkan konsep Galtung yang membawa tujuh aspek kekerasan kultural yaitu, agama, ideologi, seni, bahasa, kosmologi, ilmu formal, dan ilmu empiris (Galtung, *Cultural Violence* 1990, 296-301). Namun, melihat demografi di Afrika Selatan, penulis hanya memfokuskan hanya pada tiga aspek dari tujuh aspek tersebut yaitu aspek agama, aspek kosmologi, dan aspek ilmu empiris karena hanya tiga aspek tersebut yang relevan dengan kondisi demografi yang ada di Afrika Selatan. Sedangkan empat aspek dari tujuh aspek yang tidak terpilih, yaitu, seni, bahasa, ideologi, dan ilmu formal. Karena, penulis tidak menemukan bentuk terjadinya kekerasan perempuan dalam empat aspek tersebut. Dalam bagian pertama penulis membahas tentang aspek agama sebagai penyebab kekerasan karena adanya dalam aspek agama terdapat bahasa tuhan yang mana salah satu contohnya yaitu adanya suku zulu dengan budaya lobala dari, kemudian pada bagian kedua dari bab ini aspek kosmologi yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan berkulit hitam terjadi di Afrika Selatan selalu tidak mendapatkan keadilan seperti patriarki dan yang terakhir aspek ideologi yang mana kasus kekerasan ini tidak mendapatkan keadilan di bidang ekonomi yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada perempuan.

2.1 Kesenjangan Yang Terjadi Terhadap Perempuan Afrika Selatan

Kesenjangan terhadap perempuan berkulit hitam di Afrika Selatan mencapai puncaknya yaitu kekerasan gender yang merupakan masalah serius. Kekerasan berbasis gender merupakan ancaman yang mengkhawatirkan dan sangat berdampak pada kehidupan perempuan yang berkulit hitam di negara tersebut. Pemerkosaan serius, pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah utama yang dihadapi perempuan. Faktor ekonomi, budaya patriarki, dan sistem hukum yang lemah seringkali menjadi penyebab terjadinya kekerasan tersebut. Perempuan berkulit hitam di Afrika Selatan seringkali menjadi korban pemerkosaan dalam konteks konflik keluarga dan seringkali kesulitan melaporkan kejadian tersebut karena stigma sosial. Kurangnya bantuan hukum yang memadai. Selain itu, ketidaksetaraan gender yang tertanam dalam norma budaya membuat perempuan rentan terhadap pelecehan seksual. Kesenjangan ini diperburuk oleh kurangnya pendidikan seks yang komprehensif dan kurangnya kesadaran akan hak-hak perempuan.

Menurut South African Family Practice (SAFP) Afrika Selatan dijuluki sebagai negara dengan ibu kota pemerkosaan di dunia dengan 10.818 kasus pemerkosaan yang dilaporkan pada kuartal pertama tahun 2022. Tingkat pembunuhan perempuan di negara ini lima kali lebih tinggi dibandingkan rata-rata global. Kekerasan yang berbasis gender ini banyak terjadi dan umum terjadi karena sudah menjadi budaya dan tradisi (South African Family n.d.). Karena memiliki tingkat kekerasan berbasis gender tertinggi di dunia Afrika Selatan dijuluki sebagai “Ibu kota pemerkosaan” oleh Human Rights Watch, dengan kasus pemerkosaan, pembunuhan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan Afrika Selatan terus menghadapi tantangan kesetaraan yang sangat besar yang disebabkan oleh latar belakang sejarah penindasan selama era apartheid. Kurangnya

tindakan pemerintah untuk menegakkan hukum, sikap budaya patriarki yang masih ada, dan kemiskinan yang meluas merupakan tantangan utama yang mempengaruhi kekerasan berbasis gender di Afrika Selatan (Human Rights Watch 2009).

Tingkat terjadinya pembunuhan perempuan di Afrika Selatan yaitu sekitar 24,6 per 100.000 orang, hampir enam kali lipat dari rata-rata global. Meskipun ada undang-undang dan upaya masyarakat, tingkat pemerkosaan di Afrika Selatan hanya turun 6% sejak tahun 1996. Sekitar 28% laki-laki Afrika Selatan mengaku telah memperkosa setidaknya satu wanita, dan 46% mengaku telah melakukannya. Memperkosa setidaknya satu wanita dan pelaku berulang selain itu, 7,7% orang mengklaim telah memperkosa sepuluh wanita atau lebih (George 2023). Sejarah ketidaksetaraan dan budaya patriarki telah memperluas perbedaan antara laki-laki dan perempuan berkulit hitam di Afrika Selatan. Jika kita melihat masalah secara keseluruhan, jelas bahwa konsekuensi kekerasan seksual tidak hanya berdampak padaperempuan, tetapi juga pada seluruh masyarakat. Kekerasan berbasis gender harus diperlakukan sebagai masalah sosial daripada hanya sebagai "masalah perempuan". Memberdayakan perempuan dan melibatkan laki-laki untuk kesetaraan gender menyebabkan perempuan menjadi lebih kuat dalam komunitas di mana laki-laki belajar tentang kekerasan berbasis gender.

Pada saat ketika Nelson Mandela terpilih pada tahun 1994, dia mengakhiri perjuangan melawan rezim apartheid, yang didasarkan pada kolonisasi hegemonik Eropa di Afrika Selatan. Mungkin kesetaraan dan demokrasi telah menjadi kenyataan untuk pertama kalinya dalam sejarah negara ini. Praktik budaya dan hukum melegitimasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang tidak berdaya sebelum penghapusan apartheid. Kebijakan rasial yang memberikan hak dan status kepada orang kulit putih Afrika Selatan yang

sengaja dirampas oleh orang kulit hitam menunjukkan ketidakadilan apartheid. Meskipun demikian, kesenjangan dan praktik penguasaan ini berlaku untuk semua kelompok minoritas, termasuk perempuan. Apartheid hanya memberikan kewarganegaraan kepada laki-laki, dan perempuan hanya dianggap sebagai tanggungan. Undang-undang pasca-apartheid masih mengikuti standar ini.

Seperti yang kita tahu bahwa Afrika Selatan sebagai negara yang menganut sistem politik presidensial dan multi partai yang berupaya demokratis dalam sistem pemerintahannya Afrika Selatan mempunyai beberapa provinsi, setiap provinsi mempunyai jumlah kejadian kekerasan yang berbeda-beda. Menurut South African Police Service, banyak terjadi insiden kekerasan namun banyak yang tidak melaporkan (South African Police Service n.d). Hal tersebut terjadi karena adanya rasa takut dan malu untuk melaporkannya. Selama 2016-2018 terdapat banyak sekali kesenjangan-kesenjangan yang terjadi terhadap perempuan di Afrika Selatan. Akibat dari banyaknya tersebut membuat hampir seluruh perempuan di Afrika Selatan kurang mendapatkan hak dan kewajibannya, seperti lambatnya sistem hukum dan pemberlakuan undang-undang mengenai kekerasan.

kelompok minoritas, termasuk perempuan. Apartheid hanya memberikan kewarganegaraan kepada laki-laki, dan perempuan hanya dianggap sebagai tanggungan. Undang-undang pasca-apartheid masih mengikuti standar ini.

Hal tersebut terjadi karena adanya rasa takut dan malu untuk melaporkannya. Selama 2016-2018 terdapat banyak sekali kesenjangan-kesenjangan yang terjadi terhadap perempuan di Afrika Selatan. Akibat dari banyaknya tersebut membuat hampir seluruh perempuan di Afrika Selatan kurang mendapatkan hak dan kewajibannya, seperti lambatnya sistem hukum dan pemberlakuan undang-undang mengenai kekerasan.

2.1.1 Aspek Agama Sebagai Penyebab kekerasan Kultural

Dalam penulisan *Cultural Violence* karya Johan Galtung (1990), agama merupakan salah satu aspek kekerasan kultural dalam hal ini ajaran agama diterapkan pada hal-hal yang baik atau salah, dimana hal baik berasal dari Tuhan dan hal buruk atau salah dari setan. Kemudian dalam hal ini jika ajaran agama diterapkan atau diterapkan secara tidak tepat, maka dapat dipahami dari penjelasan Galtung bahwa hal tersebut merupakan bentuk kekerasan kultural (Galtung 1990, 298-301).

Table 1. Yang terpilih dan Yang tidak terpilih dalam Agama

Pilihan Tuhan	Bagian Setan	Konsekuensinya
Manusia	Binatang, Tumbuhan, Alam	Spesiesisme, Ekosida
Laki-laki	Perempuan	Seksisme, Pembakaran
Pengikutnya (laki-laki)	Umat Lainnya	Nasionalisme, Imperialisme
Kulit Putih	Kulit Berwarna	Rasisme, Imperialisme
Kelas Atas	Kelas Bawah	Klasisme, Eksploitasi
Orang-orang Beriman	Aliran Sesat Atau Kafir	Meritisme Inkusisi

Sumber : Galtung 1990, 297

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa siapa yang dipilih tuhan dan siapa yang bukan pilihan tuhan (dipilih setan). Ini berarti bahwa kedua hal tersebut berdampak pada tindakan seseorang. Orang yang dipilih tuhan akan diselamatkan dan berada di dekat tuhan di surga, sedangkan orang yang dipilih oleh setan akan dikutuk dan berada di dekat neraka. Hal Ini kemudian dapat mengarah pada tindakan seperti kolonialisme, seksisme, rasisme, diskriminasi, dan eksploitasi (Galtung 1990, 297). Galtung juga menjelaskan bahwa kekerasan langsung dan

kekerasan struktural adalah bagian dari kekerasan kultural.

Sebelum tahun 2016–2018, kekerasan terhadap perempuan sudah ada di Afrika Selatan. Yang mana ketika agama digunakan untuk mendukung sistem penindasan yang merendahkan martabat perempuan. Di Afrika Selatan, bahasa Tuhan digunakan untuk membela penindasan perempuan dengan mengatakan "ini adalah kehendak Tuhan", yang dapat membuat perempuan yang beriman takut. Dalam hal ini, yang dimaksudkan adalah bahwa ketika perempuan mengalami kekerasan, baik secara langsung maupun tidak langsung, itu adalah kehendak Tuhan, dan perempuan yang mengalaminya harus menerimanya (Lefebure 2000).

Dengan menggunakan bahasa Tuhan membuat laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan, apalagi dari personal perempuan itu sendiri tidak ada penolakan apa yang terjadi. Karena pandangan keagamaan ini masih terbawa hingga saat ini, meski tidak sebanyak pada zaman dahulu. Namun, masih ada laki-laki di Afrika Selatan yang masih memegang teguh prinsip tersebut dan membuat terjadinya kekerasan.

Dengan melihat kondisi demografi di Afrika Selatan, tergambar realitas yang kompleks di mana isu-isu sosial seperti kekerasan terhadap perempuan memunculkan perdebatan yang mendalam. Salah satu contohnya seperti dalam kitab suci umat Kristiani, terdapat pernyataan kaum laki-laki selalu mengaitkan isi alkitab dengan perempuan yang memprotes kekerasan yang terjadi terhadap mereka. Misalnya, dalam 1 Korintus 11:3 tertulis bahwa "Alkitab menyuruhmu untuk menaatiku", yang membuat perempuan yang sering dilecehkan oleh kaum laki-laki patuh dan tunduk (Akello Ogola 2020).

Afrika Selatan merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, di mana berbagai etnis, tradisi, dan kepercayaan saling bersilangan dan

memperkaya satu sama lain. Salah satu contoh yang mencolok adalah keberadaan suku Zulu, suku Zulu adalah salah satu suku tradisional yang paling terkenal di Afrika Selatan dan berasal dari daerah KwaZulu Natal. Mereka telah menghuni wilayah tersebut sejak akhir abad ke-18. Meskipun asalnya sebagai suku pemburu-pengumpul, Zulu kemudian beralih ke beternak sebagai mata pencaharian utama mereka selama bertahun-tahun. Untuk seorang Zulu, kekayaan dan status sosialnya sering diukur dari jumlah ternak yang dimiliki. Dalam konteks pernikahan, seorang pemuda yang hendak melamar seorang putri Zulu harus membayar sejumlah uang atau harta kepada calon ayah mertuanya sebelum pernikahan, yang dikenal sebagai lobola. yang mempertahankan warisan budaya mereka dengan kuat, termasuk hubungan erat dengan aspek spiritual dan agama. Suku Zulu masih sangat kental dengan kaitannya dengan Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari mereka (Cultures of South Africa n.d.).

Keyakinan dan praktik keagamaan seperti upacara pernikahan suku zulu mencerminkan hal ini adalah praktik budaya lobola di kalangan suku Zulu lobola merupakan praktik yang mahal karena meskipun membutuhkan biaya, banyak pasangan saat ini masih menginginkan pernikahan tradisional berwarna putih dibandingkan pernikahan adat yang ditentukan oleh Lobola (Hadithi Africa 2019).

Namun budaya lobola mengalami pergeseran, tujuan dari budaya lobola di Afrika Selatan ini untuk mengamankan posisi perempuan agar terlindungi dalam hak untuk menerima nafkah, namun seiring berjalannya waktu, budaya lobola ini menimbulkan banyak konsekuensi bagi perempuan Afrika Selatan. Karena hal ini menunjukkan bahwa banyak laki-laki yang membayar lobola (mahar) dan membeli

istri, harus sujud dan tunduk kepada laki-laki yang membayar. Dalam hal ini terdapat banyak penolakan terhadap kejahatan perempuan dan pemaksaan seks karena banyak laki-laki Afrika Selatan percaya bahwa perempuan dibayar. Akibatnya, perempuan tidak punya kekuatan untuk mengambil keputusan seksual. Selain itu, budaya lobola juga mendorong kekerasan dalam rumah tangga menjadi hal yang normal secara sosial, bahwa lobola juga membantu meningkatkan kerentanan perempuan terhadap kekerasan.

Budaya lobolo ini mengarah pada valorisasi perempuan karena menganggap perempuan adalah milik suaminya. Selain itu, dalam budaya Lobola, perempuan tidak diperbolehkan meninggalkan perkawinan setelah dibeli, jika perempuan yang dibeli ingin meninggalkan perkawinan, ia harus membayarnya kembali. Budaya lobola yang bertahan tidak dapat mengubah kekerasan perempuan di Afrika Selatan dan menyebabkan banyak penderitaan. Jika hal ini berkaitan dengan bahasa tuhan, yang berarti jika perempuan milik laki-laki mereka harus patuh dan tunduk. Perempuan akan menghadapi sanksi kekerasan yang lebih parah daripada yang sebelumnya jika mereka menolak (Africa 2019).

Dengan masih adanya budaya tersebut membuat perempuan di Afrika selatan selama tahun 2016-2018 mendapatkan kekerasan berbasis gender karena adanya sudut pandang budaya lobola yang sesuai dengan isi alkitab, oleh karena itu para perempuan Afrika Selatan harus tunduk dan patuh kepada laki-laki, yang istri atau perempuan yang sudah dibeli harus bersedia melakukan apa yang diinginkan laki-laki dan selalu berada di bawah, sehingga dapat menyebabkan ketidakadilan (Johannes Malesa and Sekudu).

Pada penjelasan Galtung tentang kekerasan kultural dalam aspek agama yang penulis paparkan, bahwa perempuan Afrika Selatan dari kelas rendah dan bukan pilihan tuhan (Galtung 1990, 297).

2.1.2 Aspek Kosmologi Sebagai Penyebab kekerasan Kultural

Galtung mengemukakan bahwa aspek kosmologi mula munculnya tindakan kekerasan tersebut. Yang artinya adalah konsep yang memandang suatu perihal lebih jauh terhadap kenyataan dan memastikan bahwa suatu yang terjadi secara wajar dan natural. Selain itu, Galtung menyatakan bahwa budaya memiliki kekuatan yang luar biasa dalam tindakan kekerasan, yang dapat dikomunikasikan secara lebih luas untuk menunjukkan tingkatan budaya tertentu dan kemudian digunakan untuk membetulkan hal yang tidak dapat dibenarkan (Galtung 1990, 294).

Diskriminasi gender yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan berkulit hitam di Afrika Selatan ini berawal dari adanya sejarah Apartheid di Afrika Selatan, yang mana berawal dari pendudukan yang dilakukan bangsa-bangsa eropa di Afrika. Bangsa yang pertama kali masuk ke Afrika adalah kolonial belanda, kedatangan kolonial belanda menimbulkan masalah dalam masyarakat lokal Afrika Selatan (Malik, n.d.)

Dimulai pada tahun 1948 apartheid sudah diberlakukan untuk masyarakat Afrika Selatan. Apartheid adalah penduduk berkulit kulit putih mengontrol penduduk kulit hitam di negara itu. Diperlukan waktu bertahun-tahun perjuangan untuk menghentikan kebijakan tersebut, yang mempengaruhi semua aspek kehidupan negara yang telah terkunci dalam diskriminasi dan rasisme yang telah berlangsung selama berabad-abad (Britannica 2024).

Politik *apartheid* ini juga menetapkan empat klasifikasi ras yakni, hitam, india, berwarna (bukan kulit putih), dan putih. Yang mana dengan adanya klasifikasi tersebut membuat mereka harus berada ditempat yang sudah ditentukan oleh politik *Apartheid* dan memiliki batasan dalam hal bersosialisasi, berada di tempat umum, dan menggunakan toilet (African Union, n.d.).

Masyarakat yang berkulit putih tinggal di perkotaan yang serba ada, sedangkan orang yang memiliki kulit hitam tinggal jauh dari perkotaan dan di tempat yang terpencil. Di sisi lain, apartheid ini menyebabkan perbedaan antara kulit hitam dan kulit putih dalam pemukiman, sekolah, dan penggunaan fasilitas umum. Dalam hal tersebut bertujuan untuk orang yang berkulit hitam dan membuat mereka merasa lebih rendah secara ekonomi, politik, dan sosial dengan melalui pendidikan. Apartheid telah dihapus pada tahun 1994 dan tidak adalagi di Afrika Selatan.

Walaupun sistem *apartheid* tidak ada lagi, banyak orang di Afrika Selatan yang masih mendiskriminasi orang berkulit hitam. Hal itu tidak menutup kemungkinan untuk mengubah stereotip tersebut. Akan tetapi diskriminasi di Afrika Selatan yang mencakup diskriminasi gender juga terjadi, bukan hanya diskriminasi ras kulit hitam dan kulit putih saja. Yang mana kaum laki-laki di Afrika Selatan percaya bahwa kaum perempuan lemah dan tidak berdaya untuk mengambil tindakan. Penggunaan kekerasan oleh kaum laki-laki membuat kaum laki-laki merasa tenang dan lebih baik ketika mereka melakukan kekerasan terhadap perempuan. Banyak laki-laki Afrika Selatan yang membuktikan kejantanan mereka terhadap perempuan. Sehingga, menyebabkan terjadinya kekerasan brutal pada perempuan. Meski demikian, diskriminasi ras dan gender masih terus berlanjut

sampai sekarang. Yang mana selama tahun 2016-2018 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan berkulit hitam di Afrika Selatan meningkat (Kakandar 2021).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perilaku budaya patriarki yang masih sangat kuat di Afrika Selatan pasalnya budaya tersebut merupakan salah satu bagian dari kekerasan kultural dalam aspek kosmologi. Dikarenakan budaya patriarki di Afrika Selatan telah menjadi fenomena yang terkait erat dengan sejarah apartheid dan juga menjadi penyebab salah satu kekerasan gender di negara tersebut. Dampaknya pun masih terasa hingga saat ini terutama dalam konteks kekerasan gender selama masa apartheid, struktur sosial yang dibangun atas dasar ketidaksetaraan sosial gender pada perempuan. Terutama yang berasal dari kelompok etnis yang terpinggirkan, mengalami beban ganda akibat diskriminasi gender (George 2023).

Budaya patriarki yang diperkuat oleh sistem apartheid mengekang peran perempuan dalam masyarakat, membatasi akses mereka terhadap pendidikan dan peluang pekerjaan. Kesenjangan gender ini menciptakan lingkungan di mana kekerasan terhadap perempuan menjadi lebih mungkin terjadi, dengan perempuan sering menjadi korban kekerasan fisik dan seksual tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai. Meskipun apartheid telah berakhir, kekerasan masih terjadi hingga tahun 2016-2018 karena warisan budaya patriarki yang berakar dalam sejarah tersebut masih merupakan hambatan dalam upaya menciptakan kesetaraan gender di Afrika Selatan. Transformasi sosial dan hukum yang lebih lanjut diperlukan untuk meruntuhkan struktur yang mendukung kekerasan gender dan memastikan hak-hak perempuan dihormati sepenuhnya.

2.1.3 Aspek Ilmu Empiris Sebagai Penyebab kekerasan kultural

Galtung mengemukakan, bahwa ilmu empiris merupakan apakah asas ekonomi dapat membenarkan aturan sebagai budaya kekerasan dalam ekonomi. Dalam hal ini, melemahnya sumber ekonomi yang menyebabkan terbatasnya sumber produksi, yang berujung pada kesenjangan ekonomi (Galtung 1990, 300). Selama tahun 2016 hingga 2018 terjadi banyak kekerasan yang diakibatkan oleh faktor ekonomi, yang memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan berkulit hitam di Afrika Selatan. Dengan adanya ketidaksetaraan ekonomi yang mencolok di antar gender menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang dapat merugikan perempuan secara langsung. Tingginya pengangguran, terutama di kalangan laki-laki, dapat menimbulkan ketegangan dan frustrasi dalam rumah tangga, yang seringkali diekspresikan melalui kekerasan terhadap perempuan (Spooner 2023). Perempuan yang bergantung secara finansial pada pasangannya mungkin mengalami kesulitan meninggalkan hubungan yang penuh kekerasan karena ketergantungan finansial. Selain itu, terbatasnya akses perempuan terhadap kesempatan kerja dan pendidikan yang setara dapat meningkatkan ketergantungan, dan membuat tingginya risiko eksploitasi dan kekerasan. Kesenjangan yang terus-menerus dalam hal gaji dan peluang karir dapat memperkuat norma-norma patriarki dan merendahkan martabat perempuan, sehingga menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya kekerasan. Berikut adalah tabel yang menyajikan kekerasan yang berujung kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi.

Tabel 2. Kejahatan Pada perempuan di Afrika Selatan

Jenis Kekerasan	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Pembunuhan	2.780	2.639	2.771
Kejahatan seksual	39.580	36.731	36.597
Percobaan Pembunuhan	3.325	3.328	3.554
Penyerangan GBH	84.091	78.090	53.263
Penyerangan Umum	84.091	78.090	81.728
Jumlah kejahatan	186.745	173.405	177.620

Sumber : South African Police Service

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kekerasan yang berujung pada kejahatan terhadap perempuan sering kali berkaitan erat dengan faktor ekonomi yang kompleks. Sehingga, dapat menciptakan ketidakstabilan sosial, memperbesar kesenjangan antara kelompok masyarakat, dan meningkatkan tekanan ekonomi pada individu. Perempuan, terutama yang berasal dari lapisan masyarakat yang kurang mampu, sering menjadi korban utama dalam situasi ini. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan, dapat memperburuk ketegangan dalam rumah tangga dan masyarakat. Oleh karena itu, mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Afrika Selatan memerlukan upaya serius untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi dengan memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang lebih baik terhadap kesempatan kerja, pendidikan dan sumber daya ekonomi lainnya. Hal ini merupakan langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan setara bagi perempuan serta mengurangi risiko kekerasan yang timbul akibat kesenjangan ekonomi, baik pada tingkat individu maupun keluarga (Service African Police Service n.d.).

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Galtung bahwa pengaruh ekonomi sebagai pembenaran dalam aturan Galtung 1990, 300). Sehingga, ekonomi seringkali menjadi alasan untuk pembenaran kebijakan atau aturan tertentu. Dalam pemerintah atau lembaga berwenang dapat menetapkan aturan untuk menangani tantangan ekonomi agar menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, untuk mengatasi ketidakseimbangan ekonomi, mengurangi pengangguran, atau meningkatkan distribusi kekayaan, kebijakan fiskal seperti pengaturan pajak dengan adanya implementasi subsidi. Akan tetapi, penggunaan masalah ekonomi sebagai pembenaran juga dapat menyebabkan kontroversi. Beberapa kebijakan mungkin dianggap menguntungkan satu golongan daripada yang lain. Namun, untuk menciptakan ketidaksetaraan yang lebih besar.

Maka, dapat disimpulkan dari bab II ini bahwa kekerasan terhadap perempuan di Afrika Selatan dapat berujung pada kejahatan akibat kekerasan kultural. Apabila kekerasan kultural terhadap perempuan di Afrika Selatan berasal dari aspek agama yang dapat dipergunakan untuk membenarkan apapun dengan pandangan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah "kehendak Tuhan". Pada aspek kosmologi, meskipun beberapa peristiwa dianggap sebagai kejadian alamiah tanpa paksaan, namun pada kenyataannya, ini mencerminkan adanya diskriminasi terhadap perempuan kulit hitam. Perempuan kulit hitam seringkali menjadi kepala rumah tangga dan mengalami kekerasan dari pasangan mereka. Sementara dalam konteks ilmu empiris yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, dapat menyebabkan terbatasnya akses perempuan terhadap peluang kerja di Afrika Selatan. Dengan demikian, penulis dapat menjelaskan dengan lebih lanjut mengenai dampak kekerasan struktural dan langsung terhadap perempuan di Afrika Selatan selama tahun 2016-2018.

BAB 3
ANALISIS KEKERASAN STRUKTURAL DAN LANGSUNG
BERDASARKAN SEGITIGA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DI AFRIKA SELATAN

Pada bab sebelumnya, penulis telah membahas bentuk dari kekerasan kultural yang terjadi terhadap perempuan berkulit hitam di Afrika Selatan. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penulis telah meneliti tiga dari tujuh aspek kekerasan kultural, seperti agama, ilmu empiris, dan kosmologi. Yang mana diketahui bahwa adanya kekerasan bermula dari suatu kebiasaan yang dilakukan secara tidak sadar oleh pelaku. Sehingga dengan adanya kebiasaan tersebut membuat awal mula terjadinya kekerasan. Selanjutnya, pada bab ketiga ini penulis akan menganalisis kekerasan struktural dan kekerasan langsung yang terjadi di Afrika Selatan dengan menggunakan konsep segitiga kekerasan Galtung.

3.1. Kekerasan Struktural Terhadap Perempuan Afrika Selatan 2016-2018

Menurut Galtung kekerasan struktural berasal dari adanya legitimasi kekerasan kultural. Kekerasan struktural merupakan bentuk kekerasan yang tidak bisa dilihat. Kekerasan struktural adalah kekerasan yang terjadi karena melanggar kebutuhan dasar seseorang tanpa mengetahui siapa yang harus disalahkan dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Galtung juga menjelaskan bahwa kekerasan struktural terjadi ketika terdapat suatu bentuk kekerasan yang dapat menimbulkan dampak yang sangat negatif terhadap struktur sosial atau institusi sosial (ekonomi, politik, atau hukum) terhadap kelompok yang mana pada akhirnya akan

menghalangi seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar (Galtung 1990, 291-296).

Table 3. Tipologi Kekerasan Menurut Galtung

No	Kategori Kekerasan	Kebutuhan Untuk Hidup	Kebutuhan Untuk Kesejahteraan	Kebutuhan Identitas	Kebutuhan untuk kebebasan
1.	Kekerasan Langsung	Pembunuhan	Pengepungan	Desosialisasi, Resosialisasi Warganegara	Represi, Penahanan Pengusiran
2.	Kekerasan Struktural	Eksplorasi B (Dirugikan dan Menyebabkan mati kelaparan)	Eksplorasi B (Kesengsaraan yang tidak diinginkan atau permanen)	Penetrasi, Segmentasi	Marjinalisasi, Fragmentasi

Sumber: (Galtung 1990, 292).

Kekerasan struktural bukanlah tindakan individu, tetapi terselubung dalam struktur yang berskala baik kecil maupun besar. Galtung, dengan menggunakan tipologi kekerasan yang telah diusungnya, menyatakan bahwa kekerasan struktural dapat dibagi menjadi empat aspek, yakni eksploitasi A yang berkaitan dengan kebutuhan hidup, eksploitasi B yang terkait dengan kebutuhan kesejahteraan, penetrasi dan segmentasi yang berkaitan dengan kebutuhan identitas, serta marjinalisasi dan fragmentasi yang berkaitan dengan kebutuhan kemerdekaan. Kekerasan struktural juga didefinisikan sebagai bentuk kekerasan yang mengakibatkan masyarakat berada di bawah tingkat potensialnya, disebabkan oleh penyalahgunaan sumber daya, wawasan, dan kemajuan untuk tujuan lain atau dimonopoli oleh sejumlah individu tertentu (Galtung 1969, 169).

3.1.1 Kekerasan struktural yang merugikan kebutuhan akan kehidupan dan kesejahteraan.

Kekerasan struktural terjadi ketika seseorang merugikan kebutuhan dasar, salah satunya adalah merugikan hak atas hidup dan kesejahteraan, yang menghasilkan terjadinya eksploitasi A dan eksploitasi B. Galtung juga menyatakan bahwa kelompok yang lemah lebih rentan akan mengalami kerugian serius hingga mengancam kelangsungan hidup mereka, misalnya melalui kelaparan dan wabah penyakit, yang termasuk dalam kategori eksploitasi A atau mereka mungkin dibiarkan dalam kondisi penderitaan yang tidak diinginkan dan bersifat permanen, seperti mengalami gizi buruk atau penyakit, yang masuk dalam kategori eksploitasi B (Galtung 1990, 293).

Salah satu alasan terjadinya kekerasan di Afrika Selatan adalah tingginya budaya patriarki. Meskipun sistem apartheid di Afrika Selatan telah dihapuskan, namun patriarki dan ketidaksetaraan ras serta gender masih ada di negara tersebut. Situasi ini menyebabkan tingkat kekerasan terhadap perempuan berkulit hitam di Afrika Selatan menduduki peringkat tertinggi di dunia. Perempuan berkulit hitam di Afrika mengalami perlakuan yang tidak adil baik di dalam lingkungan keluarga maupun di tempat kerja.

Perempuan berkulit hitam di Afrika Selatan kebanyakan bekerja di sektor pertanian karena adanya klasifikasi pekerjaan formal dan informal membuat perempuan yang bekerja informal kesusahan mendapatkan pekerjaan dan banyak mengalami ketidaksetaraan gender dan ras yang nyata dalam akses keuntungan dari pekerjaan pertanian. Meskipun banyak perempuan yang terlibat dalam pekerjaan pertanian, mereka seringkali dihadapkan dengan kendala struktural dan sosial yang

menghambat kemajuan mereka. Perempuan berkulit hitam seringkali kekurangan akses terhadap sumber daya produktif seperti tanah, modal dan teknologi pertanian. Kendala- kendala ini menghambat kemampuan perempuan untuk mengoptimalkan hasil pertanian dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, kontribusi perempuan terhadap rantai nilai pertanian seringkali tidak diakui, sehingga menyebabkan ketidaksetaraan dalam upah dan keuntungan (E. Klaas and Thupayagale-Tshweneagae 2018).

Selama tahun 2016 dan 2017, perempuan kulit hitam yang bekerja di sektor pertanian Afrika Selatan menghadapi situasi eksploitasi yang terus menerus dan merasa tidakberdaya dalam berbagai aspek, tanpa mendapatkan dukungan yang memadai dari pimpinan mereka. Hal ini membuat mereka rentan terhadap penularan HIV Pada tahun 2016, diperkirakan 36,7 juta individu hidup dengan HIV. Dari jumlah tersebut, 34,5 juta merupakan orang dewasa, dengan 17,8 juta di antaranya adalah perempuan berusia di atas 15 tahun. Sebanyak 1,8 juta orang baru terinfeksi HIV, dan 1 juta orang meninggal akibat penyakit terkait AIDS. Pada bulan Juni 2017, sekitar 20,9 juta orang menerima pengobatan antiretroviral (UNAIDS, n.d.)

Afrika Sub-Sahara menjadi tempat tinggal bagi lebih dari setengah jumlah penderita HIV secara global. Afrika Selatan, pada khususnya, memiliki profil epidemi HIV terbesar di dunia, dengan perkiraan 7,1 juta orang yang hidup dengan HIV pada tahun 2016. Negara ini juga berkontribusi sepertiga dari total kasus infeksi HIV baru di wilayah Afrika Sub-Sahara. Pada tahun 2016, terdapat 270.000 infeksi HIV baru, dan hampir dua pertiganya melibatkan perempuan. Jumlah kematian akibat penyakit terkait AIDS mencapai 110.000 orang di Afrika Selatan. Pada bulan Juni 2016, sekitar 3,7 juta orang mendapatkan akses ke program ART.

Afrika Selatan menjalankan program ART terbesar di dunia, dengan sebagian besar pendanaannya berasal dari sumber daya dalam negeri (UNAIDS n.d.).

Isu gender memiliki dampak yang meluas pada seluruh aspek masyarakat dan budaya, mencakup pertumbuhan ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Walaupun pencapaian kesetaraan gender menjadi sangat penting, kenyataannya diskriminasi terhadap perempuan masih terus terjadi. Dampak merugikan dari ketidaksetaraan ini terlihat dalam rendahnya tingkat melek huruf global di kalangan perempuan, tingginya angka kematian bayi dan ibu di tingkat regional, keterwakilan pemerintahan yang rendah di tingkat lokal dan nasional, serta tingginya persentase kekerasan terhadap anak perempuan dan perempuan (E. Klaas and Thupayagale-Tshweneagae 2018).

Hal tersebut sesuai dengan pandangan Galtung yang menyatakan bahwa melanggar kebutuhan kesejahteraan dapat mengakibatkan munculnya bentuk eksploitasi A dan eksploitasi B. Dalam insiden tersebut, individu atau kelompok yang kurang berdaya mengalami kerugian dan dibiarkan menderita. Dimana kemiskinan dan ketidaksetaraan kekuasaan perempuan membuat mereka sangat rentan terhadap infeksi HIV. Oleh karena itu, perempuan merasa terabaikan dan mengalami kesulitan dalam memperoleh kesempatan pekerjaan, yang bertujuan untuk mencapai kebutuhan hidup dan kesejahteraan mereka dengan budaya patriarki, laki-laki dianggap mendominasi baik di dalam keluarga maupun dalam masyarakat secara umum. Lebih dari itu, terdapat pandangan bahwa laki-laki dianggap lebih cerdas dan superior dibandingkan perempuan (E. Klaas and Thupayagale-Tshweneagae 2018).

3.1.2. Kekerasan Struktural yang Melukai atas Kebutuhan Identitas

Selanjutnya, untuk mendalami konsep kekerasan struktural, dalam bagian ini Galtung menjelaskan kekerasan struktural yang melukai kebutuhan atas identitas dapat terjadi ketika kebutuhan akan identitas terganggu, yang kemudian mempengaruhi penetrasi dan segmentasi. Galtung menunjukkan bahwa penetrasi dapat meningkatkan stereotip terhadap kelompok underdog (kelompok orang yang lemah). Sementara itu, segmentasi menyebabkan pembentukan stereotip yang bersifat sebagian tentang situasi yang terjadi (Galtung 1990, 294)

Pada tahun 2018 dan 2017, kekerasan terhadap perempuan berkulit hitam di Afrika Selatan sering kali terjadi melalui media sosial mainstream dan online. Perempuan dan anak perempuan menjadi sasaran kekerasan berbasis gender dalam jangka panjang di negara ini. Aktivis hak asasi manusia, organisasi dan pemimpin politik mengutuk kekerasan ini di berbagai forum, termasuk media. Masyarakat sipil Afrika Selatan mengorganisir dan memobilisasi protes dan demonstrasi serta berbicara tanpa kenallelah menentang kekerasan terhadap perempuan di negara tersebut (Oparinde and Matteau Matsha 2021).

Berdasarkan dengan adanya laporan yang telah diterbitkan oleh layanan kepolisian Afrika Selatan (SAPS) dan didukung oleh Institute for Security Studies, kekerasan berbasis gender didefinisikan sebagai kejahatan yang dapat mencakup pelanggaran berikut: pemerkosaan, kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Pelecehan seksual yang dilaporkan mencakup periode 1 April 2018 hingga 31 Maret 2019 ini menunjukkan peningkatan jumlah kasus kekerasan gender dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah pelanggaran seksual yang dilaporkan meningkat dari 50.108 pada tahun 2017 menjadi 52.420 pada tahun

2018, yang sebagian besar merupakan kasus pemerkosaan. Jumlah kejahatan seks ini meningkat dari tahun 2017 sebesar 88,3 per 100.000 menjadi 90,9 per 100.000 pada tahun 2018. Maka dari itu, peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan sejalan dengan peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual di Afrika Selatan (Statistics South Africa 2019).

Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan berkulit hitam di Afrika Selatan yang semakin meningkat, membuat kondisi semakin rumit karena perempuan berkulit hitam harus menghadapi ketidakpastian dalam ranah hukum dan politik. Meskipun sudah ada kebijakan yang ditetapkan, pelaksanaannya di lapangan menghadapi kendala serius. Yang mana kekerasan struktural tidak hanya merugikan secara fisik dan emosional, tetapi juga melukai kebutuhan identitas individu. Di Afrika Selatan, meningkatnya kekerasan terhadap perempuan berkulit hitam menggambarkan dampak negatif dari kekerasan struktural, yang disebabkan oleh ketidakpastian dalam ranah hukum dan politik.

Perempuan berkulit hitam sering kali mengalami kesulitan dalam mencari keadilan akibat perbedaan perlakuan rasial yang kental, dibandingkan dengan perempuan berkulit putih. Ketidaksetaraan dalam sistem hukum dan politik menciptakan lingkungan di mana perempuan berkulit hitam merasa terpinggirkan dan tidak diakui, menyebabkan kerusakan terhadap identitas mereka. Perlakuan diskriminatif ini tidak hanya menimbulkan rasa tidak aman dan tidak dihargai, tetapi juga memperdalam divisi rasial dalam masyarakat. Faktor yang memperburuk situasi ini yaitu tidak efektifnya pembuatan undang-undang salah satu sikap aparat penegak hukum dan komisi peradilan setempat bukan hanya itu saja bahkan kementerian kehakiman Afrika Selatan secara terbuka menggambarkan kekurangan mereka sebagai inefisiensi birokrasi yang sangat besar, pemborosan

dan kurangnya nilai uang untuk sumber daya yang digunakan. Selain itu, Tingkat hukuman atas kekerasan seksual di Afrika Selatan hanya sekitar 4% antara 8% persen dari kasus yang dilaporkan, dan karena banyak pemerkosaan tidak dilaporkan, tingkat hukuman bagi para pemerkosa dan predator seksual secara keseluruhan jauh lebih rendah. Selain adanya birokrasi yang melekat pada pengadilan di Afrika Selatan, rendahnya hukuman dapat dipengaruhi oleh keyakinan pribadi hakim dan petugas polisi (George 2020).

Bukan dari ranah hukum saja, dalam laporan Amnesty, terdapat kisah seorang perempuan berkulit hitam yang menggunakan nama samaran Natasha dan mengalami situasi kekerasan di Afrika Selatan. Peningkatan kasus kekerasan ini diakibatkan kurangnya keseriusan politisi dalam menangani isu kekerasan terhadap perempuan di negara tersebut. Selain itu, perempuan cenderung enggan melaporkan insiden kekerasan karena tergantung secara finansial pada pelaku, dan kepercayaan perempuan terhadap sistem peradilan pidana di Afrika Selatan juga rendah (Amnesty International n.d.).

Hal ini juga dapat mencakup informasi terkait dengan kekerasan struktural yang merugikan identitas, sesuai dengan konsep yang diutarakan oleh Galtung (1990). Menurut pernyataan tersebut, penetrasi yang terus menerus dapat menghasilkan munculnya stereotip terhadap kelompok atau individu yang rentan. Apabila dikombinasikan dengan segmentasi, hal ini dapat menghasilkan stereotip yang bersifat parsial atau berkaitan dengan sesuatu yang sudah terjadi atau akan terjadi. Dapat diamati bahwa pembiaran terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan di Afrika Selatan merupakan bentuk penetrasi, yang mana aparat penegakan hukum selalu meremehkan kasus tersebut.

3.1.3 Kekerasan Struktural yang Melukai kebutuhan atas kemerdekaan

Kekerasan struktural terjadi ketika kebutuhan akan kemerdekaan terganggu, yang pada akhirnya menghasilkan marginalisasi dan fragmentasi. Galtung menjelaskan bahwa dalam konteks ini, marginalisasi akan memastikan bahwa kelompok yang kurang beruntung tetap berada di pinggiran yang telah ditentukan, sementara fragmentasi akan menjaga agar kelompok tersebut tetap terpisah satu sama lain (Galtung 1990, 294).

Setiap orang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam menjalani kehidupan, tanpa memandang jenis kelamin. Di Afrika Selatan, masih umum bagi sebagian besar masyarakatnya beranggapan bahwa peran utama perempuan adalah mengurus rumah tangga dan menjadi istri, sehingga banyak perempuan di sana yang tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri serta hak mereka untuk bekerja dan bersekolah. Namun, situasinya berbeda di Afrika Selatan, di mana kehidupan perempuan sering kali dikendalikan sepenuhnya oleh laki-laki. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kesenjangan remunerasi atau kesenjangan upah perbedaan gaji antara dua kelompok, seperti laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, kesenjangan gaji perempuan berkulit hitam di Afrika Selatan menunjukkan bahwa rata-rata gaji perempuan umumnya lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang sama atau serupa.

Seperti pada tahun 2016, data dari sensus menunjukkan bahwa perempuan di Afrika Selatan hanya mendapatkan 80,5 sen untuk setiap \$1 yang diperoleh oleh pekerja laki-laki. Angka ini tetap stabil hingga tahun 2017 (Picchi 2018). Akibatnya, perempuan di Afrika Selatan kehilangan lebih dari \$10.000 setiap tahunnya karena kesenjangan upah ini, yang kemudian berdampak pada peningkatan tingkat kemiskinan dan penurunan jaminan pensiunan (Picchi 2018).

Perempuan di Afrika Selatan menghadapi kesenjangan upah sebesar 28 persen dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, pekerja paruh waktu perempuan di Afrika Selatan menempati posisi kedua tertinggi sebagai negara dengan tingkat ketimpangan upah terburuk. Kesenjangan upah berdasarkan gender di Afrika Selatan menunjukkan bahwa laki-laki memperoleh penghasilan 17 persen lebih banyak daripada perempuan rata-rata perempuan yang mendapatkan kesenjangan tersebut perempuan yang berkulit hitam (Head 2018).

Kesenjangan remunerasi ini timbul karena adanya stereotip gender yang mendorong laki-laki dan perempuan untuk mengambil peran yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini diperkuat oleh proses sosialisasi di mana perempuan sering kali didorong untuk mengasuh dan menunjukkan empati, sementara laki-laki lebih didorong untuk bersikap agresif dan kompetitif. Akibatnya, laki-laki cenderung diposisikan untuk unggul dalam lingkungan kerja. Oleh karena itu, banyak perempuan yang kurang tertarik dengan posisi gaji tinggi, yang mengakibatkan pendapatan mereka cenderung lebih rendah sepanjang hidup mereka. Dapat dilihat bahwa perempuan mulai dibayar lebih rendah daripada laki-laki segera setelah mereka memasuki dunia kerja. Dengan demikian, perempuan terjebak dalam siklus pendapatan yang lebih rendah seiring berjalannya waktu karena remunerasi seringkali bergantung pada gaji sebelumnya. Selain itu, perempuan mengalami kesulitan dalam hal remunerasi dan kemajuan karier yang menyebabkan kurangnya kontrol atas sumber daya dan aktivitas sosial yang membuat perempuan rentan mendapatkan kekerasan (Jansen van Rensburg 2021).

Hal ini sesuai dengan pandangan Galtung yang menyatakan bahwa marginalisasi akan menyebabkan orang atau kelompok yang lebih lemah (underdog) cenderung terpinggirkan dari tempat yang telah ditentukan, dan fragmentasi dapat menyebabkan kelompok yang lemah tersebar jauh satu sama lain (Galtung 1990, 294). Dalam hal ini, kesenjangan remunerasi juga dapat diinterpretasikan sebagai bentuk marginalisasi atau pembatasan hak-hak perempuan, yang menyebabkan mereka cenderung mengalami kekerasan atau memiliki keterbatasan dalam kebebasan bergerak. Fragmentasi atau sistem patriarki, di mana pencari utama pekerjaan adalah laki-laki, juga membuat perempuan rentan terhadap ketidakmampuan untuk mendapatkan posisi pekerjaan yang setara.

3.2. Kekerasan Langsung Terhadap Perempuan Afrika Selatan Pada Tahun 2016-2018

Dalam penulisan Galtung Kekerasan langsung merupakan jenis kekerasan yang mudah terlihat secara nyata, di mana pelakunya dan korban-korbannya dapat diidentifikasi dengan jelas. Menurut Galtung, kekerasan langsung lebih mudah dikenali daripada kekerasan struktural karena masalah struktural cenderung lebih kompleks dan terorganisir secara sistematis, sulit untuk diidentifikasi secara langsung. Kekerasan kultural juga membantu mengungkap kekerasan langsung dengan lebih jelas, karena adanya upaya pembenaran dan legitimasi terhadap proses tersebut. Seperti dalam tipologi kekerasan yang tercantum dalam tabel 3.1 menjelaskan empat bentuk kekerasan langsung: pertama, kekerasan terhadap kebutuhan dasar seperti kebutuhan akan hidup yang dapat mengakibatkan pembunuhan kedua, kekerasan terhadap kebutuhan akan kesejahteraan yang dapat menghasilkan pengepungan ketiga, kekerasan terhadap kebutuhan akan identitas yang dapat menyebabkan desosialisasi, resosialisasi, dan perlakuan sebagai warga

negara kelas dua dan yang terakhir, kekerasan terhadap kebutuhan akan kemerdekaan yang dapat mengakibatkan represi, penahanan, atau pengusiran (Galtung 1990, 292). Namun melihat kondisi kekerasan di Afrika Selatan selama tahun 2016-2018, hanya dua komponen yang cocok, yaitu pembunuhan dan represi.

3.2.1 Kekerasan langsung yang mengancam keberlangsungan hidup.

Galtung menjelaskan bahwa kekerasan langsung yang merusak kebutuhan akan hidup yang tidak terpenuhi dapat mengakibatkan pembunuhan. Seperti yang terlihat dalam contoh kasus kekerasan kultural di atas, pembunuhan adalah salah satu jenis kekerasan yang paling umum terjadi terhadap perempuan di Afrika Selatan. Konsekuensi dari tindakan pembunuhan ini dengan jelas menunjukkan adanya penderitaan dan korban. Menurut survei layanan kepolisian Afrika Selatan melaporkan, bahwa hampir 3000 perempuan Afrika Selatan menjadi korban pembunuhan antara tahun 2017 dan 2018. Hal ini dapat dilihat dari data yang disajikan oleh organisasi pengecekan fakta (AHO), yang menunjukkan bahwa tingkat pembunuhan di kalangan perempuan dewasa hampir mencapai 15,2 per 100.000 perempuan. Lebih lanjut, ketika dibandingkan dengan data dari Organisasi Kesehatan Dunia tahun 2016, terlihat bahwa tingkat pembunuhan adalah 12,5 per

100.000 perempuan dan anak perempuan. Dengan demikian, berdasarkan data ini, Afrika Selatan ditempatkan sebagai negara keempat terburuk dari 183 negara yang diidentifikasi, dengan kasus-kasus kekerasan berbasis gender yang ekstrim masih menjadi masalah serius di tingkat global (Participedia 2023). Salah satu contoh kasus kekerasan langsung yang terjadi terhadap perempuan di Afrika Selatan yaitu, pembunuhan kejam terhadap Hannah Cornelius yang berusia 21 tahun yang dibunuh secara kejam. pada 27 Mei 2017 Hannah dan teman prianya, Cheslin, awalnya sedang mengendarai mobil di kompleks apartemen. Namun, empat

tersangka muncul dan merampas mobil tersebut. Hannah ditahan sebagai sandera di dalam mobil, sementara Cheslin dimasukkan ke dalam bagasi oleh para penyerang itu. Kemudian, mereka pergi ke pinggiran kota Kraaifontein, yang sebagian besar adalah lahan pertanian. Di sana, para penyerang melemparkan batu bata ke arah Cheslin dengan maksud membunuhnya. Namun, ia masih selamat dan berhasil melarikan diri ke pinggiran kota terdekat untuk meminta pertolongan (Jack Lester 2021). Hannah, yang dibawa ke kebun anggur, mengalami nasib yang sama dengan Cheslin dengan kejam. Dia menjadi korban pemerkosaan dan di gilir oleh Vernon, Geraldo, dan Eben. Meskipun dia memohon untuk dibiarkan hidup, permohonannya diabaikan dan bahkan ditertawakan.

Akhir tragis menimpa Hannah ketika dia dibunuh di kebun anggur, lehernya ditusuk dengan pisau, dan kepalanya dihantam dengan batu berat 7 kilogram sehingga tengkoraknya pecah. Esoknya, polisi memulai operasi pengejaran terhadap tersangka setelah menerima laporan tentang Cheslin yang ditemukan dalam kondisi terluka parah oleh orang awam dan penemuan mayat mengerikan Hannah. Diketahui bahwa setelah pembunuhan Hannah, ketiga tersangka itu melakukan perampokan terhadap dua wanita lainnya. Berita Tentang pembunuhan kejam Hannah telah tersebar ke keluarga dan teman-temannya. Dalam persidangan, Vernon, Geraldo, dan Eben dinyatakan bersalah atas tuduhan pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, dan beberapa tuduhan lainnya. Mereka dihukum penjara seumur hidup, sementara Nashville dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Cheslin, sementara itu, terpaksa menghentikan pendidikannya karena trauma dan masalah pendengaran yang dialaminya akibat serangan yang mengerikan itu (Jack Lester 2021).

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan kekerasan langsung menurut Galtung yang terjadi terhadap perempuan di Afrika Selatan. Dalam penjelasan Galtung, kekerasan langsung mudah dikenali dan dilihat untuk menentukan pelaku dan korban. Contoh di atas bahwa pelaku atau aktor dari kekerasan langsung adalah empat pria (perampok), sementara korban adalah seorang wanita (mahasiswa, Hannah).

Pada bab 3 ini, kita dapat melihat bahwa kekerasan yang terjadi di Afrika Selatan bermula dari kekerasan struktural yang berdampak pada melegitimasi kekerasan struktural dan kekerasan langsung. Lebih lanjut, kekerasan struktural di negara tersebut dapat terlihat dari kuatnya sistem patriarki yang ada dalam masyarakat Afrika Selatan dan pemerintah yang memegang kendali, yang secara konsisten mengabaikan kebijakan dan sikap terhadap kekerasan terhadap perempuan. Akibatnya, dominasi patriarki dan kelalaian pemerintah dalam kebijakan dapat memicu terjadinya kekerasan langsung.

BAB 4

PENUTUP

2.1. Kesimpulan

Kekerasan terhadap perempuan terjadi di semua lapisan masyarakat di Afrika Selatan, karena demografi di Afrika Selatan yang mencakup sejumlah karakteristik penting yang mencerminkan keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, dan tingkat perkembangan ekonomi di negara tersebut. Namun, perempuan berkulit hitam lebih rentan terhadap kekerasan karena faktor sosial, ekonomi, dan sejarah yang kompleks di negara tersebut yang menyebabkan perempuan berkulit hitam sering kali berada di posisi yang lebih rendah dalam hierarki sosial dan ekonomi hal ini berujung menjadi ketidaksetaraan dalam berbagai akses seperti pendidikan, pekerjaan yang layak, dan juga sumber daya ekonomi dapat meningkatkan kerentanan mereka terhadap kekerasan dengan adanya faktor tersebut dapat menciptakan kondisi di mana perempuan berkulit hitam di Afrika Selatan sering kali rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik itu kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, eksploitasi seksual, atau kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain di dalam masyarakat.

Isu kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Afrika Selatan telah menjadi salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi selama 2016-2018. Bahkan, kekerasan tersebut sudah menjadi permasalahan yang umum bahkan sebelum tahun 2016. Pada bab ini penulis menyimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama tahun 2016-2018 lebih telah memenuhi tiga indikator utama dari konsep segitiga kekerasan menurut Galtung, yakni kekerasan kultural, kekerasan struktural, dan kekerasan langsung. Berdasarkan

rumusan masalah pada penelitian ini Bagaimana kekerasan pada perempuan di Afrika Selatan pada tahun 2016-2018 masih terjadi ?

Dengan adanya budaya patriarki yang kuat yang tumbuh di masyarakat Afrika Selatan menyebabkan perempuan mengalami kesulitan dalam memperoleh hak dan memenuhi kewajiban hidup mereka Budaya patriarki yang diperkuat oleh sistem apartheid mengekang peran perempuan dalam masyarakat, membatasi akses mereka terhadap pendidikan dan peluang pekerjaan. Kesenjangan gender ini menciptakan lingkungan di mana kekerasan terhadap perempuan menjadi lebih mungkin terjadi, dengan perempuan sering menjadi korban kekerasan fisik dan seksual tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai dan juga.

Kesimpulan penulis pada penelitian ini telah berhasil memenuhi tiga indikator kekerasan, yaitu kekerasan kultural, kekerasan struktural, dan kekerasan langsung. Kekerasan yang terjadi di Afrika Selatan diawali oleh faktor kekerasan yang bersifat kultural atau budaya. Ini berarti bahwa kekerasan tersebut berakar dari aspek-aspek budaya seperti agama, kosmologi, dan ilmu empiris, seperti yang dijelaskan oleh Galtung.

Contoh kekerasan kultural dari aspek agama adalah ketika agama digunakan untuk mendukung sistem penindasan yang merendahkan martabat perempuan. Di Afrika Selatan, bahasa tuhan digunakan untuk membela penindasan perempuan dengan mengatakan "ini adalah kehendak tuhan", yang dapat membuat perempuan yang beriman takut. Dalam hal ini, yang dimaksudkan adalah bahwa ketika perempuan mengalami kekerasan, baik secara langsung maupun tidak langsung, itu adalah kehendak Tuhan, dan perempuan yang mengalaminya harus menerimanya. Seperti dalam kitab suci umat Kristiani, terdapat pernyataan kaum laki-laki selalu mengaitkan isi alkitab dengan perempuan yang memprotes kekerasan yang terjadi

terhadap mereka. Misalnya, dalam 1 Korintus 11:3 tertulis bahwa "Alkitab menyuruhmu untuk menaatiku", yang membuat perempuan yang sering dilecehkan oleh kaum laki-laki patuh dan tunduk. Selanjutnya, kekerasan kultural dalam aspek kosmologi dengan adanya pemberlakuan apartheid pada tahun 1948 untuk masyarakat Afrika Selatan. Penduduk berkulit putih mengontrol penduduk kulit hitam di negara itu. Diperlukan waktu bertahun-tahun perjuangan untuk menghentikan kebijakan tersebut, yang mempengaruhi semua aspek kehidupan negara yang telah terkunci dalam diskriminasi dan rasisme yang telah berlangsung selama berabad-abad. Walaupun sistem apartheid tidak ada lagi, banyak orang di Afrika Selatan yang masih mengalami diskriminasi sampai sekarang dan sudah dianggap hal yang biasa saja.

Selanjutnya, kekerasan kultural dalam aspek ilmu empiris yang mana perempuan yang bergantung secara finansial pada pasangannya mungkin mengalami kesulitan meninggalkan hubungan yang penuh kekerasan karena ketergantungan finansial. Selain itu, terbatasnya akses perempuan terhadap kesempatan kerja dan pendidikan yang setara dapat meningkatkan ketergantungan, dan membuat tingginya risiko eksploitasi dan kekerasan. Kesenjangan yang terus-menerus dalam hal gaji dan peluang karir dapat memperkuat norma-norma patriarki dan merendahkan martabat perempuan, sehingga menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya kekerasan. Kemudian, Menurut Galtung kekerasan struktural berasal dari adanya legitimasi kekerasan kultural. Kekerasan struktural merupakan bentuk kekerasan yang tidak bisa dilihat. Kekerasan struktural adalah kekerasan yang terjadi karena melanggar kebutuhan dasar seseorang tanpa mengetahui siapa yang harus disalahkan dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Galtung juga menjelaskan bahwa kekerasan struktural terjadi

ketika terdapat suatu bentuk kekerasan yang dapat menimbulkan dampak yang sangat negatif terhadap struktursosial atau institusi sosial. Selanjutnya, Galtung menyatakan bahwa kekerasan struktural dapat dibagi menjadi empat aspek, yakni eksploitasi A yang berkaitan dengan kebutuhan hidup, eksploitasi B yang terkait dengan kebutuhan kesejahteraan, penetrasi dan segmentasi yang berkaitan dengan kebutuhan identitas, serta marjinalisasi dan fragmentasi yang berkaitan dengan kebutuhan kemerdekaan. Kekerasan struktural juga didefinisikan sebagai bentuk kekerasan yang mengakibatkan masyarakat berada di bawah tingkat potensialnya, disebabkan oleh penyalahgunaan sumber daya, wawasan, dan kemajuan untuk tujuan lain atau dimonopoli oleh sejumlah individu tertentu.

Contoh kekerasan struktural yang dapat merugikan kebutuhan akan kehidupan dan kesejahteraan yaitu, banyak perempuan di Afrika mengalami perlakuan yang tidak adil baik di dalam lingkungan keluarga maupun di tempat kerja. Selanjutnya, kekerasan struktural yang dapat melukai Identitas akibat kurangnya kebijakan pemerintah Afrika Selatan membuat penegakan hukum lemah dan telah berdampak pada meluasnya kekerasan berbasis gender di Afrika Selatan. Bukan dari ranah hukum saja, peningkatan kasus kekerasan ini diakibatkan kurangnya keseriusan politisi dalam menangani isu kekerasan terhadap perempuan di negara tersebut. Selain itu, perempuan cenderung enggan melaporkan insiden kekerasan karena tergantung secara finansial pada pelaku, dan kepercayaan perempuan terhadap sistem peradilan pidana di Afrika Selatan juga rendah. Dan yang terakhir, kekerasan struktural yang dapat melukai kemerdekaan perempuan terjebak dalam siklus pendapatan yang lebih rendah seiring berjalannya waktu karena remunerasi seringkali bergantung pada gaji sebelumnya. Selain itu, perempuan mengalami kesulitan dalam hal remunerasi dan kemajuan karier yang

menyebabkan kurangnya kontrol atas sumber daya dan aktivitas sosial yang membuat perempuan rentan mendapatkan kekerasan.

Kekerasan langsung merupakan jenis kekerasan yang mudah terlihat secara nyata, di mana pelakunya dan korban-korbannya dapat diidentifikasi dengan jelas. Menurut Galtung, kekerasan langsung lebih mudah dikenali daripada kekerasan struktural karena masalah struktural cenderung lebih kompleks dan terorganisir secara sistematis, sulit untuk diidentifikasi secara langsung. Kekerasan kultural juga membantu mengungkap kekerasan langsung dengan lebih jelas, karena adanya upaya pembenaran dan legitimasi terhadap proses tersebut. Contoh kasus kekerasan langsung yang terjadi terhadap perempuan di Afrika Selatan yaitu, pembunuhan kejam terhadap Hannah Cornelius yang berusia 21 tahun yang dibunuh secara kejam.

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas kekerasan terhadap perempuan di Afrika Selatan telah memenuhi tiga indikator teori Galtung. Namun kebanyakan yang mengalami kekerasan yaitu perempuan berkulit hitam yang mana dapat dilihat pada awalnya, kekerasan tersebut terjadi karena adanya budaya dan kultural seperti agama, kosmologi, dan ilmu empiris. Kemudian, terdapat kekerasan struktural yang terjadi karena kurang responsifnya pemerintah dan lembaga yang bertanggung jawab di Afrika Selatan terhadap kebutuhan masyarakat, yang secara tidak langsung meningkatkan kekerasan terhadap perempuan. Dampak dari hal ini adalah munculnya tindakan kekerasan langsung, seperti kekerasan fisik, pemerkosaan, dan pembunuhan terhadap perempuan di Afrika Selatan.

2.2 Rekomendasi

Dalam penelitian yang telah dibahas oleh penulis dimulai dari bab satu hingga bab tiga hanya fokus terhadap analisis kekerasan berbasis gender pada perempuan yang berkulit hitam di Afrika Selatan pada tahun 2016-2018 dengan menggunakan segitigakekerasan Galtung. Oleh karena itu, penulis memberikan sebuah rekomendasi kepada para peneliti selanjutnya yang mungkin tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan baik itu di Afrika Selatan maupun di bagian negara Afrika lainnya. Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya dengan melihat dan menjelaskan fenomena yang lebih mendetail dan analisis yang berbeda sehingga dapat menjadikan penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Africa, Hadithi. 2019. "All About Lobolo: The price of love." Hadithi Africa. <https://hadithi.africa/all-about-lobolo-lobola-the-price-of-love/>.
- "African Union." n.d. African Union. Accessed February 24, 2024. <https://au.int/en/auhrm-project-focus-areaapartheid>.
- "AFRIKA." 2022. Afrika Selatan Perangi 'Pandemi' Pemerksaan dan Pelecehan Seksual. <https://www.voaindonesia.com/a/afrika-selatan-perangi-pandemi-pemerksaan-dan-pelecehan-seksual-/6451125.html>.
- Akello Ogola, Esther. 2020. "The South African cleric taking on the church over a rapist priest." <https://www.bbc.com/news/world-africa-53424373>.
- "#AmINext #SAShutdown GBV movement in South Africa – Participedia." 2023. Participedia. <https://participedia.net/case/12313>.
- "Angka perkosaan di Afrika Selatan sangat mencemaskan." 2016. BBC. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/08/160816_dunia_afsel_perkosaan.
- "Apartheid | South Africa, Definition, Facts, Beginning, & End." 2024. Britannica. <https://www.britannica.com/topic/apartheid>.
- C.Mubangizi, John, and Timotius Nicholson. 2023. "How gender-based cultural practices violate women's property rights and inhibit property ownership: A South African perspective." *Women's Studies International Forum*. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2023.102678>.
- "Documents." n.d. UNAIDS. Accessed February 24, 2024. <https://www.unaids.org/en/resources/documents/2024>.
- E. Klaas, Ntombifikile, and Gloria Thupayagale-Tshweneagae. 2018. "The role of gender in the spread of HIV and AIDS among farmworkers in South Africa." *Afr J Prim Health Care Fam Med*. 10.4102/phcfm.v10i1.1668.
- Enaifoghe, Andrew O. 2019. "Gender Based Violence and the Global Gendered Viewpoint Approaches to Building a Peaceful South Africa." *Journal of Social and Development Sciences* Vol. 10, no. ISSN 2221-1152 (June): 15. <https://web.archive.org/web/20200208115743/https://ojs.amhinternational.com/index.php/jsds/article/download/2905/1869>.
- "exploring the colourful cultures of South Africa." 2016. The Rainbow Nation. https://docs.google.com/document/d/1owsw7X5nqrBUxSX2juvxNTCv154_e9xLfAaVmIIZFk/edit.

- “FACTSHEET: South Africa's crime statistics for 2017/18.” 2018. Africa Check. <https://africacheck.org/fact-checks/factsheets/factsheet-south-africas-crime-statistics-201718>.
- Galtung, Johan. 1969. “Violence, Peace, and Peace Research.” Vol. 6, No. 3, 1969:167-191. <https://www.jstor.org/stable/422690>.
- Galtung, Johan. 1990. “Cultural Violence.” Volume 27 (Issue 3): 294. <https://doi.org/10.1177/0022343390027003>.
- George, Lacey. 2023. “Gender-Based Violence Against Women in South Africa - Ballard Brief.” Ballard Brief. <https://ballardbrief.byu.edu/issue-briefs/gender-based-violence-against-women-in-south-africa>.
- “Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di Afrika Selatan – DW – 27.11.2006.” n.d. DW. Accessed February 25, 2024. <https://www.dw.com/id/gerakan-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-di-afrika-selatan/a-2958013>.
- Gouws, Amanda. 2020. *Decolonisation After Democracy: Rethinking the Research and Teaching of Political Science in South Africa*. Edited by Laurence Piper. N.p.: Routledge.
- Head, Tom. 2018. “Gender pay gap: Four charts that show a shocking gulf between SA men and women.” South African. <https://www.thesouthafrican.com/news/gender-pay-gap-south-africa-charts/>.
- “Human rights in South Africa Amnesty International.” n.d. Amnesty International. Accessed March 1, 2024. <https://www.amnesty.org/en/location/africa/southern-africa/south-africa/>.
- “Improve Shelter Funding; Increase Access for Sex Workers, LGBT, Undocumented Survivors.” 2021. South Africa: Broken Promises to Aid Gender-Based Violence Survivors. <https://www.hrw.org/news/2021/11/24/south-africa-broken-promises-aid-gender-based-violence-survivors>.
- Jansen van Rensburg, Shandré K. 2021. “Doing gender well: Women's perceptions of gender equality and career advancement in the South African security industry.” *SA Journal of Industrial Psychology*. <http://dx.doi.org/10.4102/sajip.v47i0.1815>.
- Johannes Malesa, Kgashane, and Johannah Sekudu. 2022. “Being Married but Having no “Rights”: Misinterpretations of Magadi-Lobola.” Vol.20, No 20. https://journals.co.za/doi/10.10520/ejc-linga_v20_n2_a3.
- Kakandar, Timi. 2021. Discrimination and gender inequalities in Africa: what about equality between women and men? <https://igg-geo.org/?p=3863&lang=en>.
- Lefebure, Leo D. 2000. *Revelation, the Religions, and Violence*. <https://www.amazon.com/Revelation-Religions-Violence-Leo-Lefebure/dp/1570753008>.

- Malik, Aggas. n.d. "Politik Apartheid Afrika Selatan." Abhiseva. Accessed February 23, 2024. https://abhiseva.id/politik-apartheid-afrika-selatan/#Munculnya_Politik_Apartheid_di_Afrika_Selatan.
- Mitchell, Claudia, Naydene d. Lange, and Relebohile Moletsane. 2018. 317. 10.1163/9789004356368_020.
- Naidoo, Klaus, Andrew von Pressentin, and Selvandran Rangiah. n.d. South African Family Practice. Accessed February 24, 2024. <https://safpj.co.za/index.php/safpj>.
- "No Healing Here: Violence, Discrimination and Barriers to Health for Migrants in South Africa | HRW." 2009. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/report/2009/12/07/no-healing-here/violence-discrimination-and-barriers-health-migrants-south-africa>.
- Oparinde, Kunle, and Rachel Matteau Matsha. 2021. "Powerful Discourse: Gender-Based Violence and Counter-Discourses in South Africa." <https://doi.org/10.1080/23311983.2021.1911035>.
- Picchi, Aimee. 2018. "4 ways women earn less than men." CBS News. <https://www.cbsnews.com/news/4-ways-women-earn-less-than-men/>.
- "Services." n.d. Services | SAPS (South African Police Service). Accessed February 24, 2024. https://www.saps.gov.za/services/older_crimestats.php.
- Spooner, Moina, Thabo Leshilo, Alessandra Pioreschi, Amanda Gouws, Bomikazi Zeka, Catherine Pereira, and Tinuade A. Ojo. 2023. "South African women: violence, health and money issues among 5 biggest obstacles that stand in their way." The Conversation. <https://theconversation.com/south-african-women-violence-health-and-money-issues-among-5-biggest-obstacles-that-stand-in-their-way-211140>.
- "THE STORY OF THE CRUEL MURDER OF HANNAH CORNELIUS." 2021. JACK LESTER. <https://www.jacklester33.com/2021/09/kisah-pembunuhan-kejam-hannah-cornelius.html>.
- "Submission to the South Africa Department of Justice | Human Rights Watch." 2021. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/news/2021/07/06/human-rights-watch-submission-south-africa-department-justice>.
- Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun proposal penelitian kualitatif skripsi dan tesis*.
- Swemmer, Sheena. 2020. "Justice denied? Prosecutors and presiding officers' reliance on evidence of previous sexual history in South African rape trials." <https://doi.org/10.17159/2413-3108/2020/i69a6380>.

“Understanding South Africa's New Gender-Based Violence Laws.” 2020. Global Citizen.

<https://www.globalcitizen.org/en/content/south-africa-new-laws-gender-violence-what-to-know/>.

“Victims of crime report 2018/19 | Statistics South Africa.” 2019. Stats SA.

<https://www.statssa.gov.za/?p=12620>.

“Violence against women and girls is one of the world's most prevalent human rights violations, taking place every day, many times over, in every corner of the globe. It has serious short- and long-term physical, economic and psychological consequences on .” n.d. UN Women. Accessed February 20, 2024. <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence>.